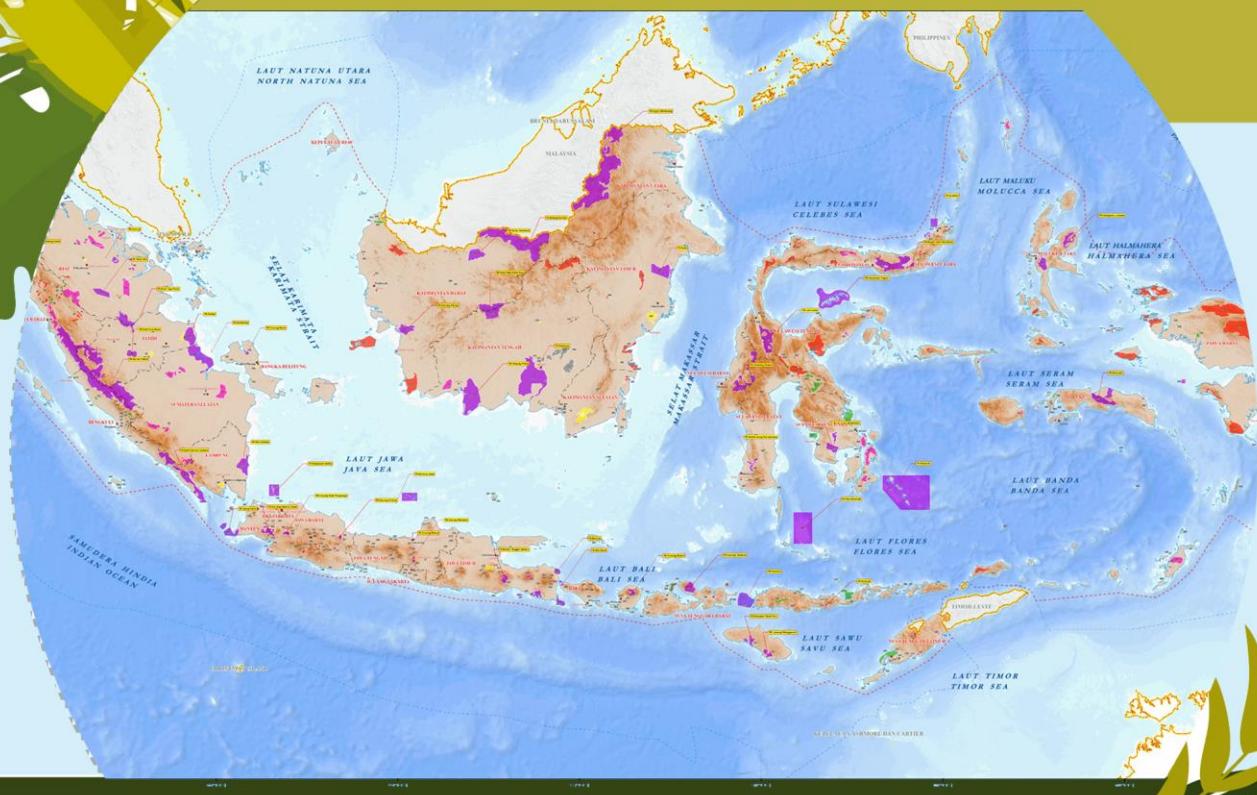


LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019

**DIREKTORAT PEMOLAAN
DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Bogor, Telp/Faks (0251) 8380742
Jl. Padjadjaran No. 79 Bogor, Telp/Faks (0251) 8357956, 8357960
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 14, Jakarta 10270
Email : ditpika@gmail.com



Dit Pika Pika



@ditpika



pika.ksdae.menlhk.go.id



@ditpika



+6281315512524



LAPORAN KINERJA

[LKj]

DIREKTORAT

PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

DITJEN KSDAE

TAHUN 2019



**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020
Januari, 2020**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2019 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.2/Ksdae/Set/Ren.2/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2019 memuat pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat PIKA dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat PIKA Tahun 2019 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Jakarta, Januari 2020

Plt. Direktur,



Ir. Tandy Tjahjana, M.Si

NIP.19620412 199203 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, khususnya peningkatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam, melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam. Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai dua sasaran konservasi, yaitu:

- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; serta
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2019, Direktorat PIKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur PIKA dengan Direktur Jenderal KSDAE. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian IKK tahun 2019 adalah sebesar 272,86%. Realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2019 sebesar Rp.18.346.245.53,- atau 94,04 % dari total anggaran sebesar Rp19.509.334.000,-.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok) tahun 2019 adalah 110 dokumen dari target 30 dokumen (366,67%), Capaian Kinerja s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 397 dokumen dari target 150 dokumen (264,67%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 99,46 %. Secara teknis dalam pencapaian Kinerja s.d tahun 2019 sudah baik karena sudah melebih target, namun untuk mendukung pencapaian target Kebijakan Satu Peta (KSP) Dirjen KSDAE maka keseluruhan total kawasan konservasi harus sudah tertata kawasannya sehingga masih ada tersisa kawasan



konservasi yang harus di tata kawasannya. Kendala yang dihadapi dalam mendukung pencapaian penataan zona blok seluruh Indonesia antara lain Penyusunan Zona Blok masih ada keterbatasan informasi dan pemuktahiran dikarenakan manajemen survei atau inventarisasi belum terhimpun dan kuat di UPT dan Pusat, UPT masih Belum menerapkan konsep KMK untuk memenuhi informasi kawasan secara cepat, Kompetensi tim penyusun dan pembahasan maun tim pokja masih perlu ditingkatkan dalam memahami Tujuan pengelolaan, Nilai penting dan tekanan kawasan; Merumuskan alokasi ruang dan tindakan yang tidak boleh dilakukan, Mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar, Peran Pokja Penilaian masih perlu dioptimalkan seperti Paritisipasi dalam bentuk bimtek UPT, Peningkatan kapasitas anggota Pokja, Meluaskan latar anggota Pokja, Masih kurangnya peningkatan Kecepatan dalam hal Pengiriman dokumen paska konsultasi public, Proses penilaian dokumen di Pusat, Pengiriman dokumen paska Penilaian, Proses pengesahan di Pusat. Dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1, jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok, maka perlu dilakukan perbaikan dan pencermatan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target IKK, Perlu diseleksi kegiatan yang perioritas yang mendukung pencapaian target IKK untuk dilaksanakan diawal tahun kegiatan, Akan tetap berkoordinasi dengan UPT dan UPTD yang mengundang terkait dengan konsultasi publik, apabila UPT/UPTD mengalokasikan anggaran untuk Pusat menghadiri konsultasi publik.

3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2019 adalah 77 unit dari target 101 unit rekomendasi (76,24%), Capaian Kinerja s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 546 unit dari target 521 unit rekomendasi (104,79%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 99,92%. Kendala dalam IKK ini antara lain belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan EKF merupakan kewajiban yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Hal tersebut juga berimplikasi pada kesiapan UPT untuk mengalokasikan anggaran kegiatan EKF. Data-data hasil inventarisasi lapangan yang masih kurang, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kawasan. Hal tersebut juga disebabkan oleh karena penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan UPT tidak dilakukan secara terstruktur dan rapi. Tindak lanjut dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi adalah Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang



-
- lebih komprehensif. Membuat sistem data base data hasil inventarisasi lapangan dan juga evaluasi kesesuaian fungsi.
4. Capaian Kinerja IKK 3 (Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang Valid dan Reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2019 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), Capaian Kinerja s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 3 sebesar 99,83%. Kendala dalam pencapaian IKK ini antara lain UPT belum memiliki data yang lengkap pada KK yang dikelola dan membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan inventarisasi sesuai amanat Permenhut No.P.81/2014. Strategi dalam rangka penyempurnaan jumlah paket data adalah sosialisasi Permenhut No. P.81/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA, diperlukan anggaran yang lebih besar untuk UPT dalam melakukan inventarisasi data, percepatan hasil, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang IPK pada UPT.
5. Capaian Kinerja IKK 4 (Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang Terbentuk Sebanyak 100 Unit KPHK) tahun 2019 adalah 39 dari target 7 unit usulan KPHK (557,14%), Capaian Kinerja s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 114 dari target 100 unit usulan KPHK (114%), dan realisasi anggaran pada IKK 4 sebesar 96,25%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK ini antara lain belum dipahaminya materi penyusunan rancang bangun KPHK oleh UPT lingkup KSDAE. Selain itu, KPHK juga belum dianggap sebagai sesuatu yang perlu segera dilakukan oleh UPT.
6. Capaian Kinerja IKK 5 (Jumlah Kerja Sama Pembangunan Strategis dan Kerja Sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi tahun 2015-2019 sebanyak 100 PKS), realisasi tahun 2015-2019 sebanyak 306 PKS (306%) dengan rincian: (1) Tahun 2015 sebanyak 20 PKS; (2) Tahun 2016 sebanyak 38 PKS; (3) Tahun 2017 sebanyak 85 PKS; (4) Tahun 2018 sebanyak 85 PKS; dan Tahun 2019 sebanyak 78 PKS. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam rangka pencapaian IKK ini mengingat Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengisi celah kekurangan (*filling the gap*) antara perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh UPT. Kerjasama juga banyak diminati oleh berbagai pihak yang ingin turut langsung berkontribusi dalam upaya konservasi baik melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maupun yang memang karena kepentingan usahanya perlu dinaungi dengan skema kerjasama. Permasalahan yang ada dalam pencapaian IKK ini lebih banyak bersifat teknis yaitu masih belum adanya NSPK atau petunjuk teknis terkait kerjasama, masih belum dipatuhi prosedur kerja sama serta monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kerja sama yang belum optimal.



Dalam rangka mengatasi permasalahan dan sebagai strategi dalam peningkatan IKK ini adalah dengan melakukan sosialisasi teknis prosedur yang ada dalam peraturan terkait kerjasama kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) khususnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA. Peraturan lain yang erat kaitannya dengan substansi kerjasama juga terus menerus disosialisai guna memperkuat pemahaman dalam pelaksanaan kerjasama. Selain hal tersebut, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan perjanjian kerjasama, perlu disosialisasikan beberapa surat edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SE.12/KSDAE/Set/Kum.3/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan PKS Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

7. Forest Programme III – Sulawesi (Direktorat PIKA selaku Project Executing Agency)

Kegiatan Forest Programme III tahun 2019 sebanyak 15 jenis kegiatan, yang terealisasi sebanyak 13 kegiatan, yang terealisasi yaitu Finansial Audit yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (KAP Sutarmaji), Planning workshop, Publikasi kegiatan FP III, Pembayaran konsultan (4 kali dalam 1 tahun), pelatihan dan lokakarya (pelatihan drone tingkat lanjut, pelatihan analisa jaringan sosial, dan pelatihan monitoring FP III), Koordinasi FP III yang dilaksanakan ke beberapa lokasi Fasilitasi pelaksanaan FP III di lokasi proyek, monitoring dan evaluasi kegiatan FP III dari Project Executing Agency ke Project Implementing Unit, Honorarium pelaksana FP III selama 11 bulan, National Steering Committee yang pertama kali dilaksanakan, konsinyasi pemantapan struktur FP III, studi banding yang dilaksanakan ke Srambang Park, Mojosemi Park dan SM Paliyan di Yogyakarta, dan yang terakhir adalah international tour yang dilaksanakan ke Jerman dan Paris (menghadiri MAB meeting). Sedangkan kegiatan yang tidak terealisasi adalah pembayaran awal untuk kegiatan penelitian. Kegiatan ini tidak bisa dibayarkan karena proposal yang diajukan oleh konsorsium penelitian (Universitas Gottingen, IPB University, dan Universitas Tadulako) masih perlu direvisi, dan belum dikembalikan ke Direktorat PIKA hingga pertengahan Desember 2019. Kegiatan lainnya yang tidak terealisasi adalah monitoring eksternal, karena ToR / SOPnya belum disetujui oleh KfW.



Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2019 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.

Jakarta, Januari 2020
Plt. Direktur,



Ir. Tandyah Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Penataan Kawasan	4
B. Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan	5
C. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan	6
D. Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis (Renstra)	9
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
A.1 IKK 1 : Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok. 15	15
A.2 IKK 2 : Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia	23
A.3 IKK 3 : Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	27
A.4 IKK 4 : Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	30
A.5 IKK 5: Jumlah Kerja Sama Pembangunan Strategis dan Kerja Sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS.	37
A.6 <i>Forest Programme III - Sulawesi</i>	41
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV	46
PENUTUP	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	3
Tabel 2. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2015-2019	11
Tabel 3. Perjanjian Kinerja 2019.....	12
Tabel 4. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2019.....	14
Tabel 5. Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2019	15
Tabel 6. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1	15
Tabel 7. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan	16
Tabel 8. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1.....	19
Tabel 9. Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2019	23
Tabel 10. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 Tahun 2015-2019.....	23
Tabel 11. Rekapitulasi status kesesuaian fungsi hasil kajian evaluasi kesesuaian fungsi	25
Tabel 12. Persentase Capaian Kinerja IKK 2 Tahunan dan Renstra.....	26
Tabel 13. Pencapaian IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2019	27
Tabel 14. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3	27
Tabel 15. Jumlah Paket Data dan Informasi KK Tahun 2015 – 2019.....	29
Tabel 16. Persentase Capaian Kinerja IKK 3 Tahunan dan Renstra.....	30
Tabel 17. Target dan Data Usulan KPHK Tahun 2015 - 2019.....	32
Tabel 18. Persentase Capaian Kinerja IKK 4 Tahunan dan Renstra (KPHK Non TN)	32
Tabel 19. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 4	33
Tabel 20. Pencapaian target tahun 2019 untuk IKK 4 Direktorat PIKA	34
Tabel 21. Pencapaian IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2019	39
Tabel 22. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5 Periode 2015-2019	39
Tabel 23. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2019.....	40
Tabel 28. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2019	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PIKA	2
Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat PIKA Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Gambar 3. Diagram Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA	13
Gambar 4. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1	16
Gambar 5. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan	17
Gambar 6. Kondisi Penataan Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2019	19
Gambar 7. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1	20
Gambar 8. Persebaran Kawasan Konservasi yang sudah di sahkan penataan KK (Biru) dan yang belum disahkan penataan KK (Merah) Tahun 2019.....	21
Gambar 9. Dokumen Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan yang sudah disahkan.	22
Gambar 10. Diagram Kenaikan/PenurunanCapaian Kinerja IKK 2	24
Gambar 11. Diagram Status Kesesuaian Fungsi Hasil EKF Desk Study Tahun 2019	25
Gambar 12. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2.....	26
Gambar 13. Diagram Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3	28
Gambar 14. Prototipe Aplikasi SIPIKA Versi 3.0	29
Gambar 15. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 3.....	30
Gambar 16. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 4 (Pembentukan KPHK Non Taman Nasional).....	33
Gambar 17. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian IKK 4.....	34
Gambar 18. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen KSDAE dengan BPPT tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Sistem Deteksi DiniAncaman Tsunami Selat Sunda untuk Mitigasi Bencana Gunung Anak Krakatau diCA dan CAL Kepulauan Krakatau,Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 15 Maret 2019 di Jakarta.....	38
Gambar 19. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5	39
Gambar 21. pembagian anggaran hibah yang ada di PEA dan PIU.....	42
Gambar 22. Realisasi Direktorat PIKA selaku PEA dari tahun 2016 hingga 2019	42
Gambar 23. Data realisasi seluruh proyek FP III yang ada di PEA dan PIU	43
Gambar 24. Diagram Serapan Dana HLN.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	50
Lampiran 2	52
Lampiran 3	55
Lampiran 4	58
Lampiran 5	63



BAB I

PENDAHULUAN

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Untuk meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II salah satunya adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) yang melaksanakan tugas di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam untuk mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat PIKA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PIKA menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (Tahura), dan taman buru (TB);
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;

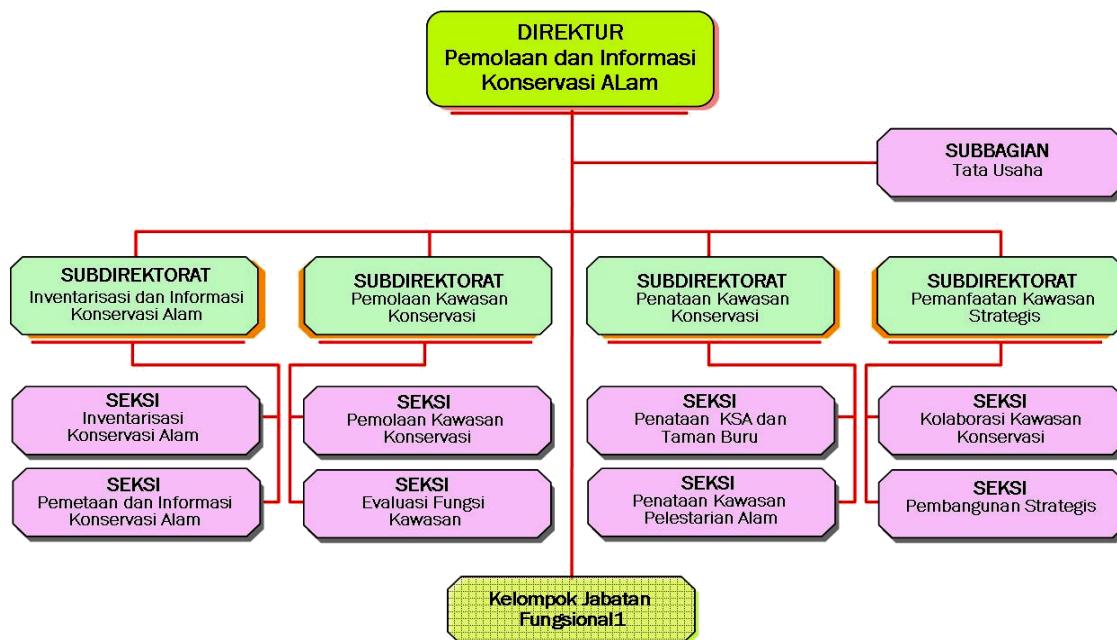


-
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;
 - e. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan Tahura; dan
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PIKA didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam;
- b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Direktorat PIKA adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 dibawah ini.



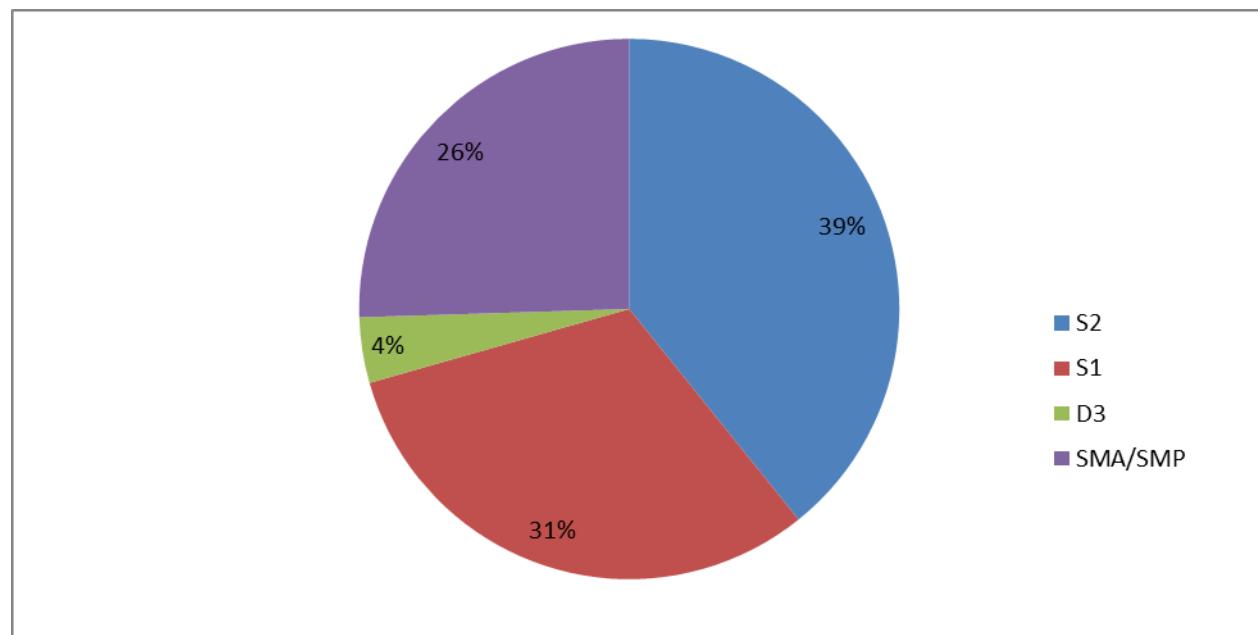
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PIKA



Direktorat PIKA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 51 orang (PNS) dan 20 orang (Non PNS) yang tersebar dimasing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha. Dari jumlah pegawai (PNS), apabila dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, maka pegawai Direktorat PIKA didominasi lulusan S2 sebanyak 20 orang (38%), lulusan S1 sebanyak 16 orang (31,37%), SMA/SMP sebanyak 13 orang (25,49%), dan D3 sebanyak 2 orang (3,9%) dari seluruh pegawai yang ada. Gambaran lengkap terkait jumlah kepegawaian dan tingkat pendidikan pegawai sebagaimana disajikan dalam tabel 1 dan gambar 2.

Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan/Subdit/Subbag	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA/SMP	
1	Direktur	-	-	-	-	0
2	Subdit Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam	5	3	-	3	11
3	Subdit Pemolaan Kawasan Konservasi	3	3	-	2	8
4	Subdit Penataan Kawasan Konservasi	3	3	-	3	9
5	Subdit Pemanfaatan Kawasan Strategis	6	3	1	1	11
6	Sub Bagian Tata Usaha	3	4	1	4	12
		20	16	2	13	51



Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat PIKA Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sesuai aspek strategis organisasi, Direktorat PIKA mengembangkan sasaran kegiatan untuk menjamin efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat PIKA selaku penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam mempunyai ruang lingkup tugas, yang meliputi:

- a. Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak melalui penataan kawasan konservasi yang meliputi penyusunan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja.
- b. Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk ditindak lanjut baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi.
- c. Inventarisasi petensi melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang *reliable* dan *upto date*, baik hayati maupun non hayati pada kawasan konservasi yang masih banyak belum ditemukan dan terdokumentasikan dengan baik.
- d. Pembangunan KPHK dalam bentuk wadah penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari ditingkat tapak.
- e. Kerjasama penyelenggara KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

A. Penataan Kawasan

Berdasarkan data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, sampai dengan tahun 2019, dari 554 unit kawasan konservasi yang dikelola, telah dilakukan penataan kawasan (zonasi/blok) sebanyak 397 unit kawasan dengan rincian : 49 Zonasi



Taman Nasional; 95 Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam; 26 Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya; 158 Blok Cagar Alam; 61 Blok Suaka Margasatwa, dan 7 Blok Taman Buru. Dengan demikian masih ±157 KK yang belum memiliki rencana penataan zona atau blok. Berdasarkan data dan informasi ini masih banyak unit kawasan konservasi, khususnya pada kawasan Non Taman Nasional yang belum dikelola berdasarkan rencana penataan kawasan. Rendahnya tingkat penyelesaian penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum selesai sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan, kurangnya data dan informasi potensi kawasan konservasi hasil inventarisasi potensi. Mengingat pentingnya penataan zona dan blok sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, maka dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015 – 2019 telah ditetapkan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yaitu tersusunnya 150 Dokumen Penataan Zonasi Taman Nasional maupun Penataan Blok Non Taman Nasional. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 Direktorat Jenderal KSDAE juga diamanatkan untuk menyelesaikan penataan zona /blok seluruh Kawasan Konservasi skala 1:50.000 yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2018 pada semua Provinsi di Indonesia.

B. Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diberi amanah untuk mengelola seluruh kawasan konservasi tersebut secara efisien dan lestari. Dalam rangka mencapai pengelolaan KK yang efektif dan efisien, maka diperlukan kegiatan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi serta Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi (Lokasi : 521 Unit KK seluruh Indonesia yang menjadi target) yang meliputi: Fasilitasi Pemantapan Kawasan Konservasi, Penataan Kawasan Konservasi melalui Zonasi dan Blok, Evaluasi Kesesuaian Fungsi/ Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi, dan kerjasama dalam rangka pengelolaan KK. Kegiatan-kegiatan tersebut



dilakukan secara simultan antara Direktorat Teknis dan UPT seluruh Indonesia, sesuai dengan perannya masing-masing.

Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaianya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya. Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kesesuaian fungsi mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.49/Menlhk-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi pada KSA dan KPA.

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA yang terdegradasi, baik dalam bentuk pemulihan maupun perubahan fungsi. Selain itu, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi juga dapat menjadi langkah awal bagi proses perubahan fungsi yang bukan berbasis degradasi kawasan. Sesuai dengan ketentuan di atas, ada dua kemungkinan tindak lanjut dari evaluasi kesesuaian fungsi yakni: pemulihan ekosistem/habitat atau perubahan fungsi. Penentuan tindak lanjut ditentukan sesuai rekomendasi dari Tim Teknis setelah melakukan kajian/penelitian. Rekomendasi inilah yang menjadi keluaran (output) dari pencapaian.

C. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan

Inventarisasi potensi kawasan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, hasil inventarisasi potensi kawasan menjadi dasar dalam penentuan tujuan pengelolaan KSA dan KPA. Namun potensi kawasan hingga saat ini belum diketahui secara utuh dan mendalam karena beberapa hal:

1. Terdapat celah (*gap*) antara luas kawasan konservasi yang harus diinventarisir dengan ketersedian anggaran dan sarana-prasarana pendukung kegiatan inventarisasi, maupun sumber daya manusia pelaksana kegiatan inventarisasi.



-
2. Keterbatasan SDM tidak hanya dalam hal jumlah namun juga kapasitas dan pengetahuan dalam melakukan inventarisasi potensi kawasan maupun pengelolaan data dan informasi melalui sistem informasi potensi kawasan spasial dan non spasial.
 3. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, namun pelaksanaan bimbingan teknis yang cukup singkat dan sangat terbatas menyebabkan pendalaman materi kurang memadai.

Terkait pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan, beberapa hal yang menjadi kendala adalah:

1. Data dan informasi perihal paket data kawasan konservasi belum tersedia secara utuh/lengkap dari Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Belum efektifnya proses input data ke dalam Aplikasi SIPIKA karena terbatasnya sarpras dan Sumber Daya Manusia.

D. Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA

1. Berdasarkan audit kinerja Direktorat PIKA Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal KLHK, direkomendasikan untuk dibangun database kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA, dilakukan penambahan anggaran kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA, penambahan Sumberdaya Manusia (SDM) untuk penelaahan teknis permohonan kerjasama, peraturan terkait pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama penyelenggaraan KSA/KPA dari Direktur Jenderal KSDAE kepada Kepala UPT, dan perlunya dilakukan monitoring evaluasi perjanjian kerja sama secara kontinyu dan tepat waktu.
2. Di beberapa kawasan konservasi masih terdapat kegiatan non konservasi yang belum dipayungi mekanisme kerjasama penyelenggaraan KSA/KPA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA.



-
3. Di sebagian UPT/UPTD yang mengelola kawasan konservasi belum memahami mekanisme pemanfaatan kawasan konservasi melalui skema kerjasama/penyelenggaraan KSA/KPA, sehingga perlu dilakukan sosialisasi tatacara kerjasama di KSA/KPA, termasuk pemenuhan kewajiban persyaratan permohonan kerjasama, penyusunan naskah PKS, RPP, dan RKT kerjasama.
 4. Terdapat perbedaan persepsi yang mendasar terkait kegiatan eksisting seperti Migas di kawasan konservasi yang akan dipayungi dengan mekanisme perjanjian kerja sama. Mitra memahami kegiatan eksisting yang diakomodir dalam mekanisme kerjasama adalah izin-izin eksisting yang telah ada sebelum kawasan konservasi ditunjuk/ditetapkan. Namun di pihak lain memahami kegiatan eksisting hanyalah keberadaan sarpras dan kegiatan yang telah ada tanpa menambah atau melakukan kegiatan baru di dalam kawasan konservasi.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, maka Direktorat PIKA berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya atau Laporan Kinerja (LKj), sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2019 ini disusun dengan maksud sebagai wujud pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat PIKA Tahun Anggaran 2019. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan dilingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 hanya menjabarkan strategi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Visi : Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, visi pembangunan adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi : Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan dengan misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;



-
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Sasaran : Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai dua sasaran konservasi, yaitu:

1. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Program : Direktorat PIKA termasuk dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kegiatan : Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2015-2019, antara lain :

1. Penyusunan dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi untuk mendapatkan pengesahan dokumen zonasi dan/atau blok.
2. Pemantapan rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi untuk KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.
3. Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan *reliable* pada KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.
4. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional.
5. Pemantapan kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi.
6. Pemantapan peta zonasi/blok/arahan penataan KK yang terintegrasi ke dalam peta RBI Skala 1:50.000 sesuai kriteria tim penilai KSP di seluruh indonesia.



Target Jangka Menengah yang harus dicapai Direktorat PIKA dalam kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (Volume dan Satuan) Per Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
2.	Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
4.	Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	40 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
5.	Terwujudnya kerjasama pembangunan dan kerjasama penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
6.	Terintegrasinya zonasi/blok pengelolaan KK ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa	Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan KK kedalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa	-	-	551 KK	551 KK	-



Target-target sebagaimana pada tabel di atas harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja setiap tahunnya.

B. Perjanjian Kinerja

Direktorat PIKA telah menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA. Perjanjian Kinerja tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

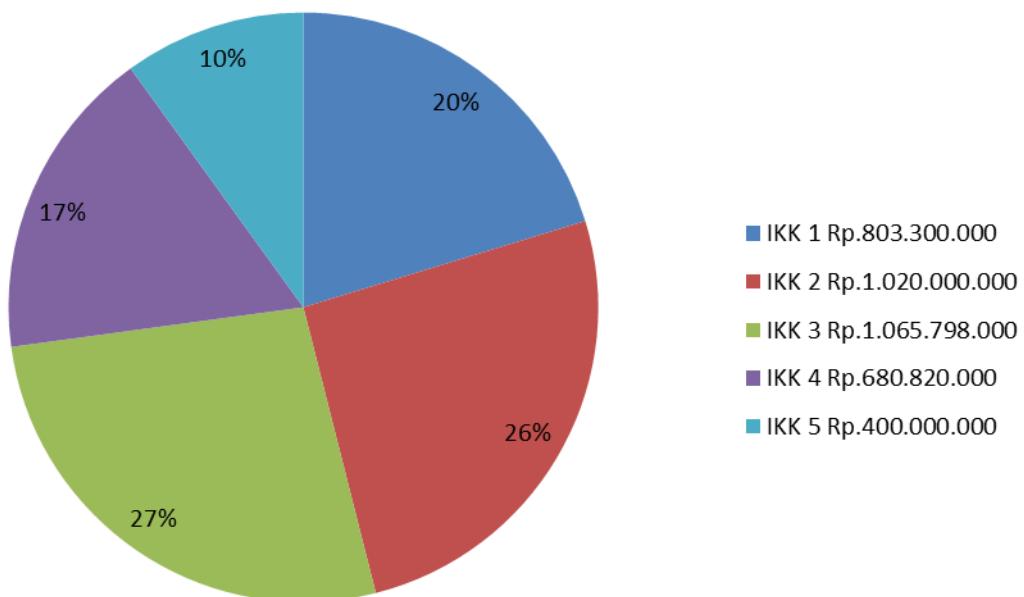
Tabel 3. Perjanjian Kinerja 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Perjanjian Kinerja Awal	Perjanjian Kinerja Revisi
1.	Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	30 Dokumen
2.	Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 Unit	110 Unit
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data
4.	Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	100 Unit	100 Unit
5.	Terwujudnya kerjasama pembangunan dan kerjasama penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	20 PKS

Untuk mewujudkan pencapaian IKK tersebut, Direktorat PIKA mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.19.509.334.000,-. Rincian penganggaran setiap IKK dapat dilihat pada gambar berikut.



Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA Tahun 2019



Gambar 3. Diagram Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dapat membantu suatu organisasi dalam mendekripsi kelebihan/kekurangan dari target yang telah ditentukan, sehingga kelebihan/kekurangan tersebut dapat dianalisa untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019, Renja Ditjen KSDAE Tahun 2019, dan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019.

Direktorat PIKA sebagai penanggungjawab salah satu kegiatan Program KSDAE, yaitu kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai pada tahun 2019.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA yang harus dicapai sebanyak 5 (lima) indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Direktur PIKA sebagai Komitmen Pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal KSDAE atas Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2019. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat PIKA seperti disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)	Target 2019	Capaian 2019	% Capaian 2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	64 Dokumen	110 Dokumen	171,88
2.	Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	53 Unit	77 Unit	145,28
3.	Jumlah paket data	Jumlah paket data dan	521	521	100



	dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521	Paket Data	Paket Data		
4.	Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	7 Unit	39 Unit	557,14	
5.	Terwujudnya kerjasama pembangunan dan kerjasama penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	78 PKS	390	
RATA-RATA						272,86

A.1 IKK 1 : Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok.

Tabel 5. Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2019	Realisasi IKK Tahun 2019	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	64 Dokumen	110 Dokumen	171,88	803.300.000	798.395.800	99,46

Tabel 6. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1

No.	Tahun	Target	Jumlah Dokumen Penataan Blok	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2015	30	35	-
2.	2016	30	85	142,86
3.	2017	30	46	-43,9
4.	2018	30	121	163,04
5.	2019	64	110	-9,09
Total		184	397	

Dapat juga dilihat pada gambar diagram kenaikan/penurunan capaian kinerja IKK 1 sebagai berikut :



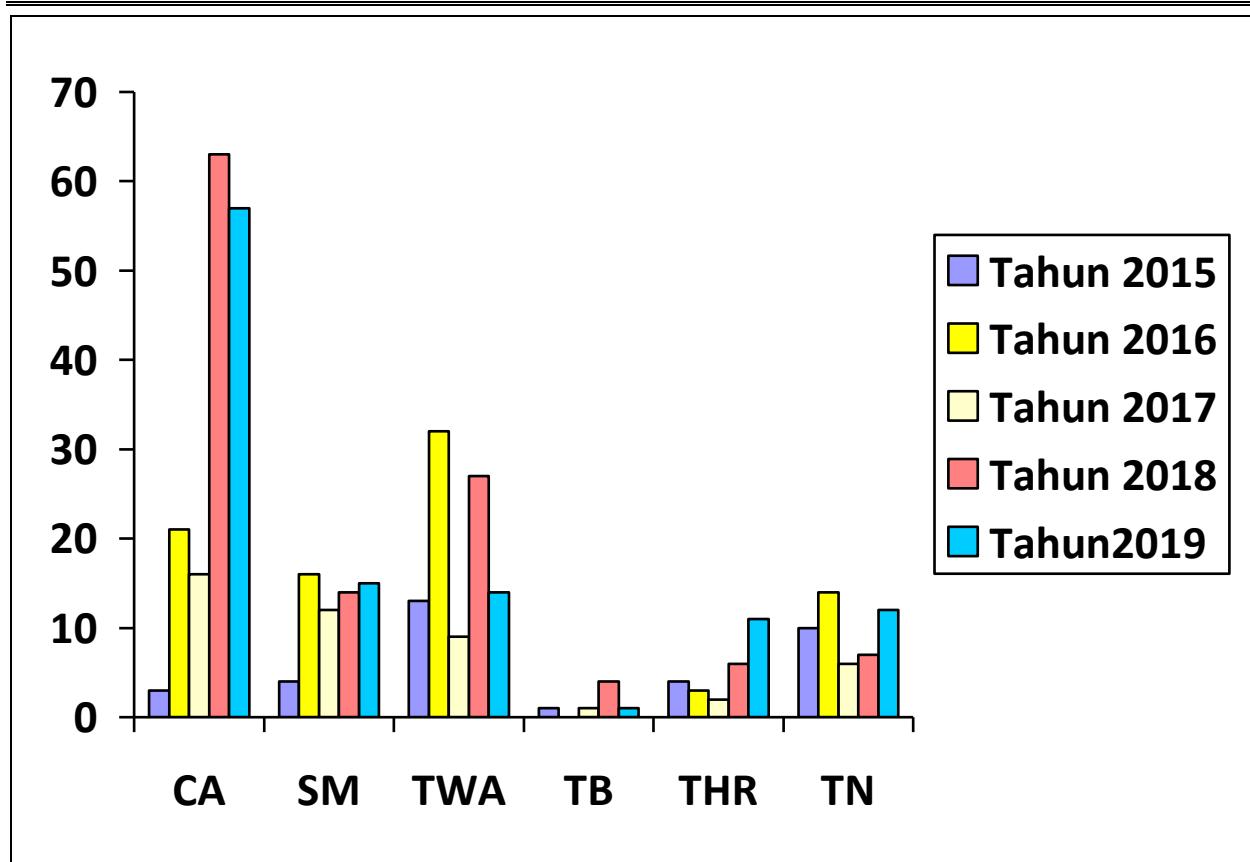
Gambar 4. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1

Pada tahun 2015, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 116,67% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 35 dokumen zonasi dan/atau blok. Data capaian kinerja pada IKK 1 dapat dilihat pada lampiran 3, untuk ringkasan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 7. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan

No.	Tahun	Fungsi Kawasan Konservasi						Total
		CA	SM	TWA	TB	THR	TN	
1	2015	3	4	13	1	4	10	35
2	2016	20	16	32	-	3	14	85
3	2017	16	12	9	1	2	6	46
4	2018	63	14	27	4	6	7	121
5	2019	57	15	14	1	11	12	110
TOTAL		159	61	95	7	26	49	397

Dapat juga dilihat pada gambar diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan sebagai berikut :



Gambar 5. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan

Pada tahun 2016, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 283,3% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 85 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Pada tahun 2017, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 153,33% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 46 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Pada tahun 2018, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 400,33% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 121 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.



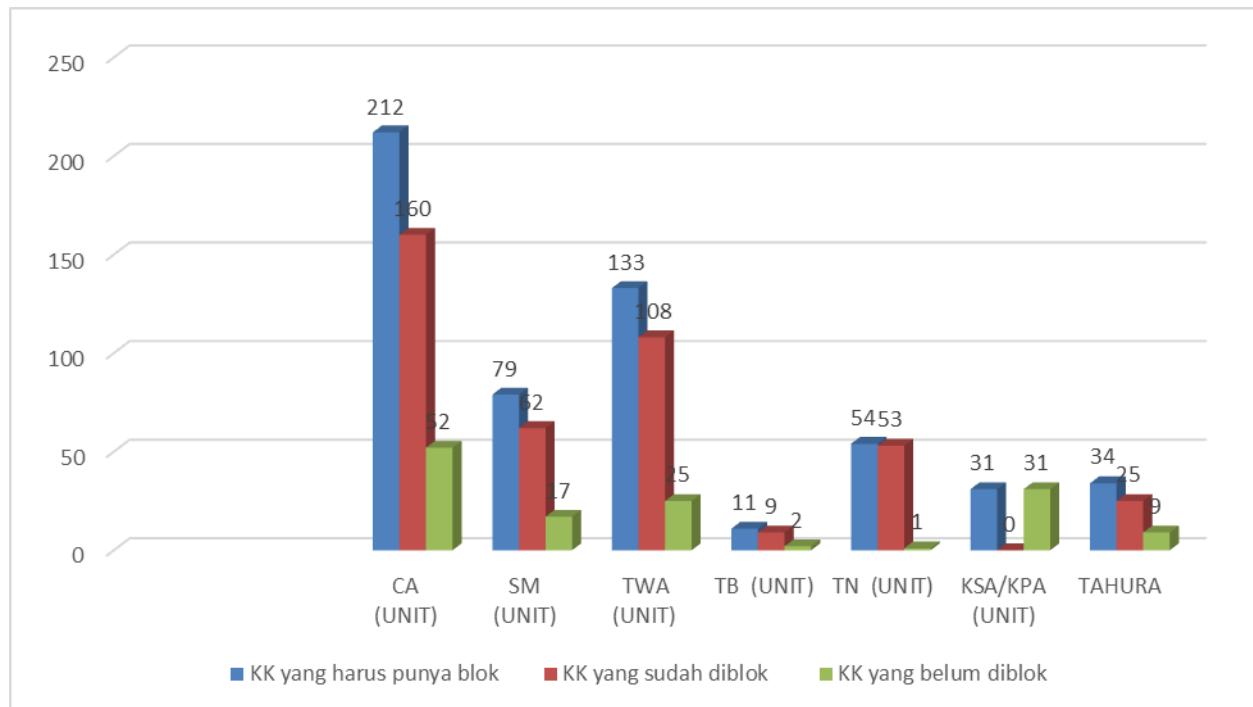
Pada tahun 2019, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 366,67% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 110 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, maka persentase target jangka panjang yang telah dicapai adalah sebesar 264,67 % atau 397 dokumen zonasi dan/atau penataan blok dari rencana 150 dokumen.

Jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kawasan konservasi (554 unit), maka dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang telah disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 397 dokumen, sehingga jika di total dengan jumlah seluruh kawasan yang telah memiliki dokumen zona dan blok yang sudah disahkan sebanyak 417 dokumen atau dengan kata lain bahwa 75,27 % kawasan konservasi telah memiliki zonasi dan/atau penataan blok pengelolaan dari 554 Kawasan Konservasi di Seluruh Indonesia.

Tabel 9. Kondisi Penataan Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2019.

No.	Data Kawasan	KAWASAN KONSERVASI							JUMLAH (UNIT)
		CA (UNIT)	SM (UNIT)	TWA (UNIT)	TB (UNIT)	TN (UNIT)	KSA/KPA (UNIT)	TAHURA	
1	KK yang harus punya zona/blok	212	79	133	11	54	31	34	554
2	KK yang sudah zona blok	160	62	108	9	53	0	25	417
3	KK yang belum zona/blok	52	17	25	2	1	31	9	137



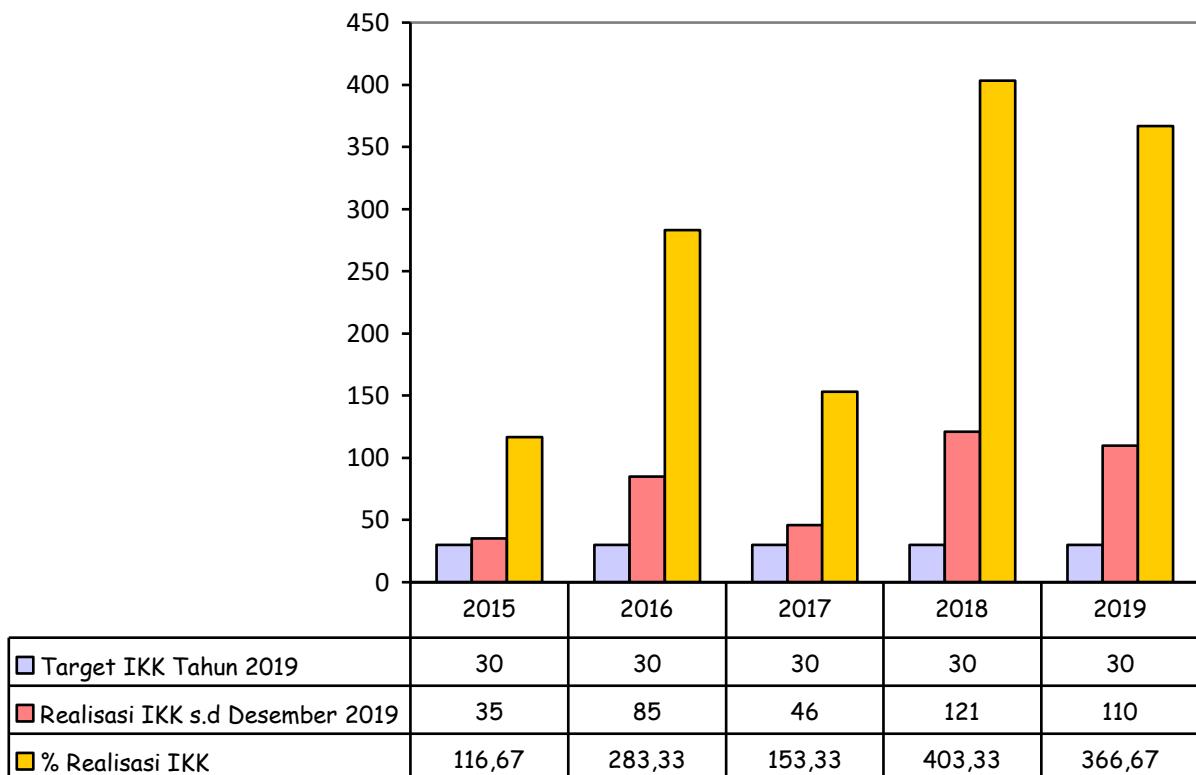
Gambar 6. Kondisi Penataan Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2019

Tabel 8. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Dokumen Penataan Zonasi/Blok)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	30	150	35	116,67	23,3
2.	2016	30	150	85	283,33	56,67
3.	2017	30	150	46	153,33	108,67
4.	2018	30	150	121	403,33	189,33
5.	2019	30	150	110	366,67	264,67
Total		150	150	397	264,67	



Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 1 sebagai berikut :



Gambar 7. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

Beberapa permasalahan dan rekomendasi terkait pencapaian kinerja pada IKK 1 Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok :

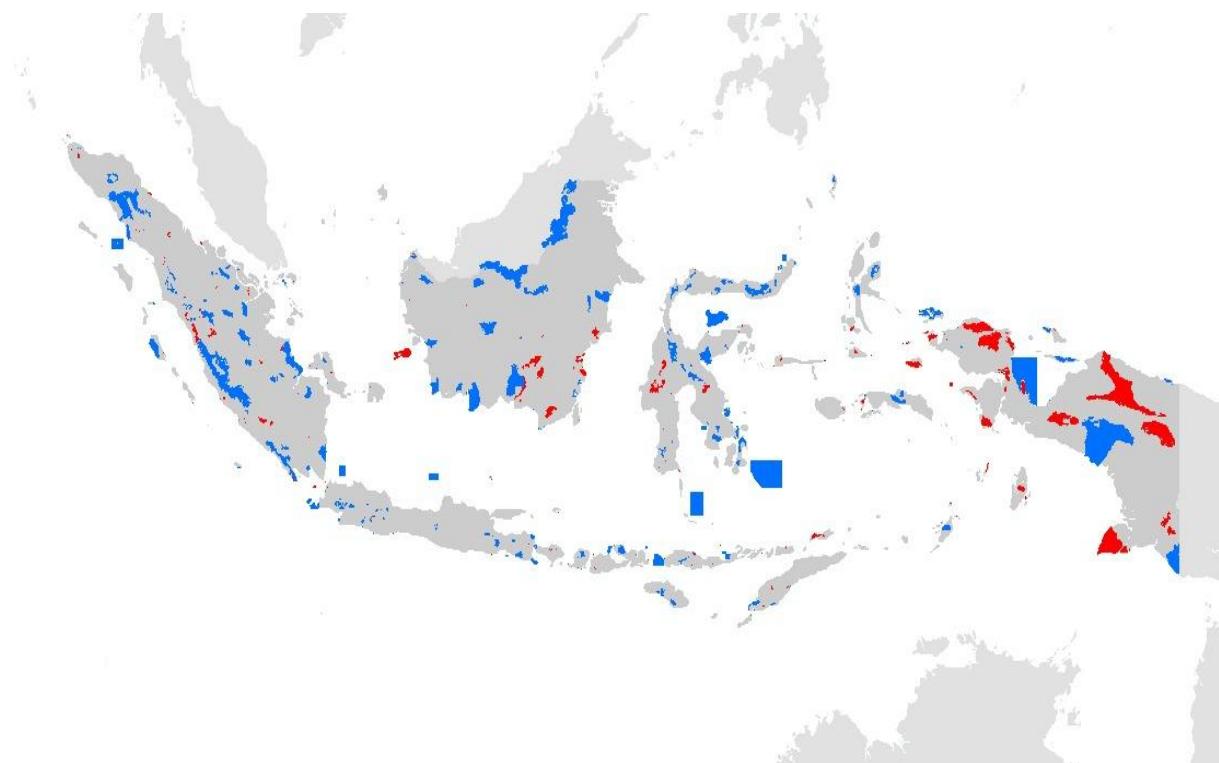
1. Penyusunan Zona Blok masih ada keterbatasan informasi dan pemuktahiran dikarenakan manajemen survei atau inventarisasi belum terhimpun dan kuat di UPT dan Pusat.
2. UPT masih Belum menerapkan konsep KMK untuk memenuhi informasi kawsan secara cepat.
3. Kompetensi tim penyusun dan pembahasan maun tim pokja masih perlu ditingkatkan dalam memahami Tujuan pengelolaan, Nilai penting dan tekanan kawasan; Merumuskan alokasi ruang dan tindakan yang tidak boleh dilakukan, Mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar,
4. Peran Pokja Penilaian masih perlu dioptimalkan seperti Paritisipasi dalam bentuk bimtek UPT, Peningkatan kapasitas anggota Pokja, Meluaskan latar anggota Pokja.



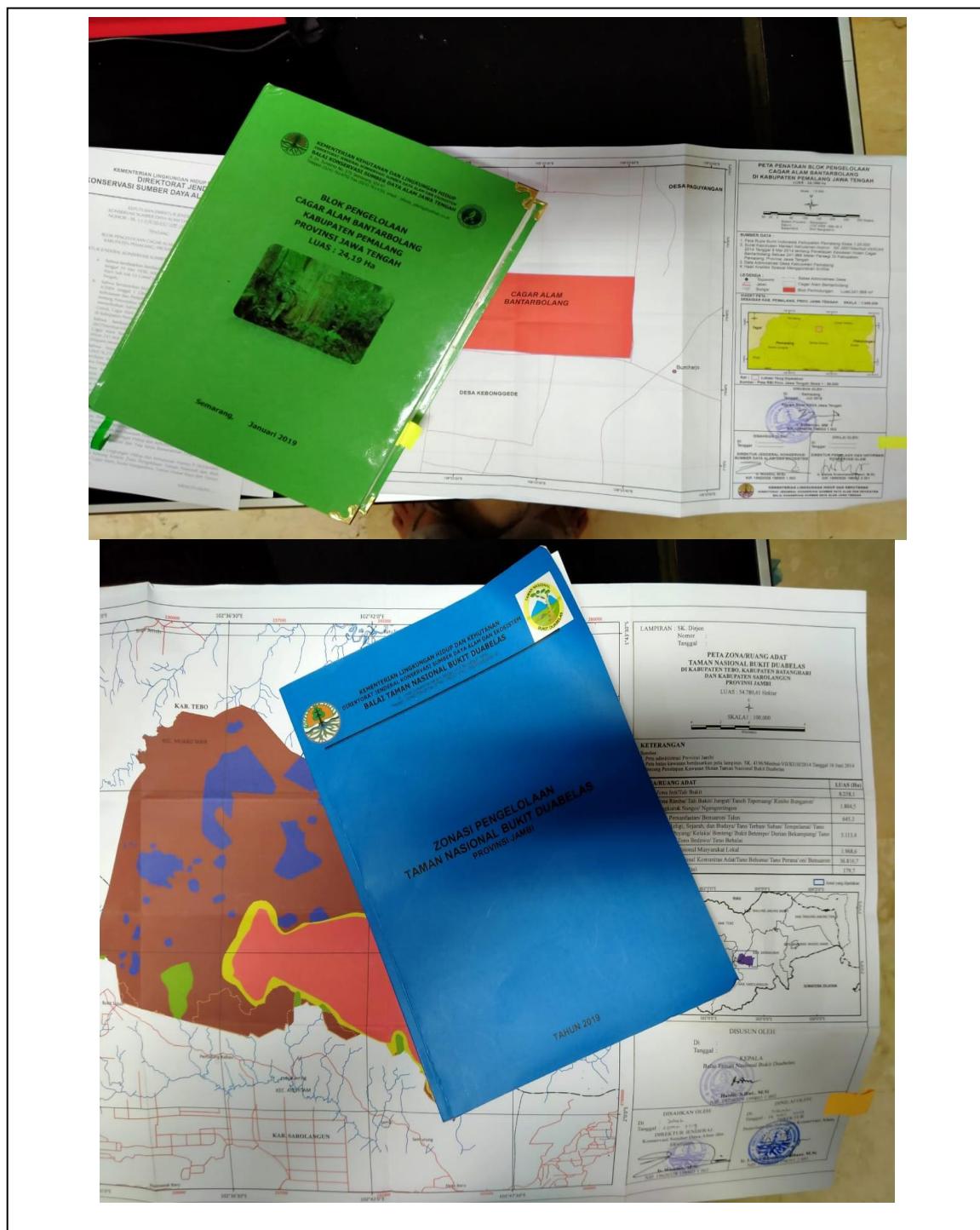
-
5. Masih kurangnya peningkatan Kecepatan dalam hal Pengiriman dokumen paska konsultasi public, Proses penilaian dokumen di Pusat, Pengiriman dokumen paska Penilaian, Proses pengesahan di Pusat.

Tindak Lanjut penanganan permasalahan dalam pencapaian kinerja :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1, jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok, maka perlu dilakukan perbaikan dan pencermatan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target IKK;
2. Perlu diseleksi kegiatan yang prioritas yang mendukung pencapaian target IKK untuk dilaksanakan diawal tahun kegiatan.
3. Akan tetap berkoordinasi dengan UPT dan UPTD yang mengundang terkait dengan konsultasi publik, apabila UPT/UPTD mengalokasikan anggaran untuk Pusat menghadiri konsultasi publik.



Gambar 8. Persebaran Kawasan Konservasi yang sudah di sahkan penataan KK (Biru) dan yang belum disahkan penataan KK (Merah) Tahun 2019.



Gambar 9. Dokumen Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan yang sudah disahkan.



A.2 IKK 2 : Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia.

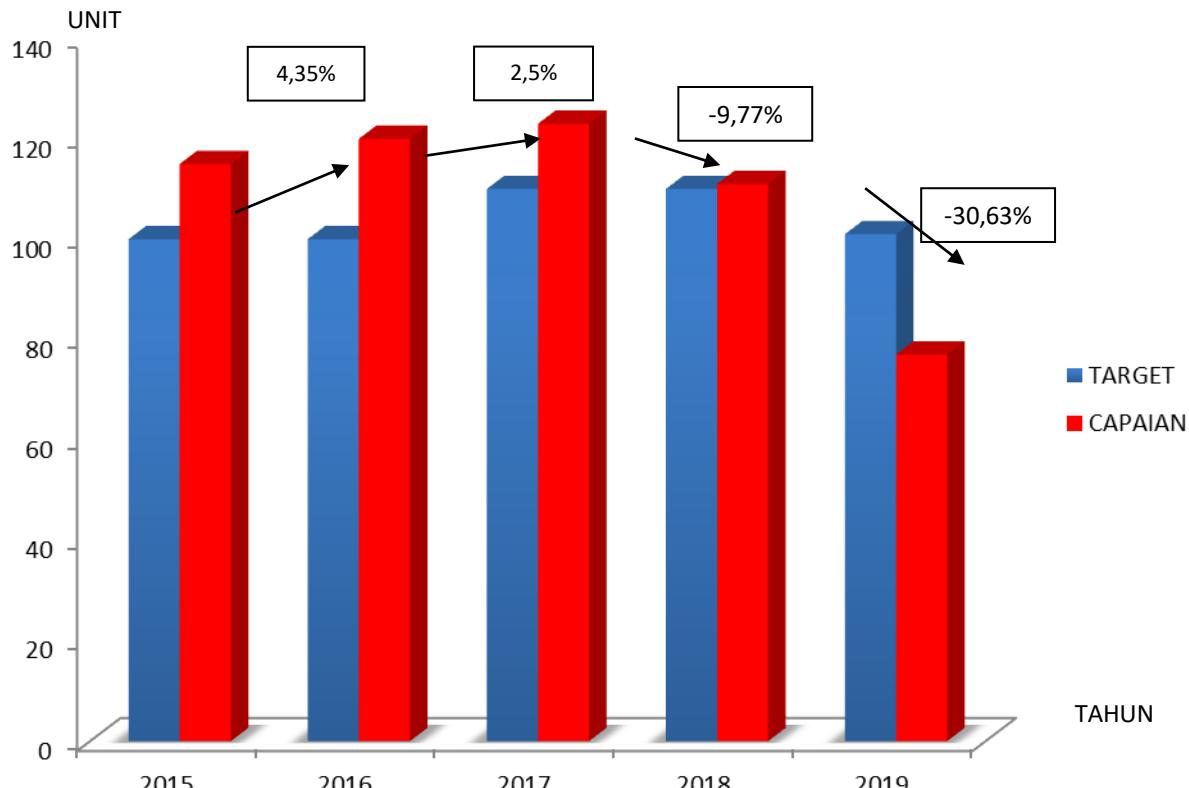
Pelaksanaan EKF yang dilakukan dimaksudkan agar dalam perkembangannya, pengelola dapat memahami secara ilmiah bagaimana kondisi KSA dan KPA yang menjadi lingkup kerjanya dari waktu ke waktu. Dalam rangka pencapaian IKK, maka dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan dengan metode *desk study*. Pencapaian kinerja Pada IKK 2 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 9. Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2019	Realisasi IKK Tahun 2019	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA, dan TB di seluruh Indonesia	53 Unit	77 Unit	145	1.020.000.000	1.019.193.937	99,92

Tabel 10. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2 Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Target	Jumlah Rekomendasi EKF	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1	2015	100	115	-
2	2016	100	120	4,35
3	2017	110	123	2,5
4	2018	110	111	-9,77
5	2019	101	77	-30,63
TOTAL		521	546	



Gambar 10. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2

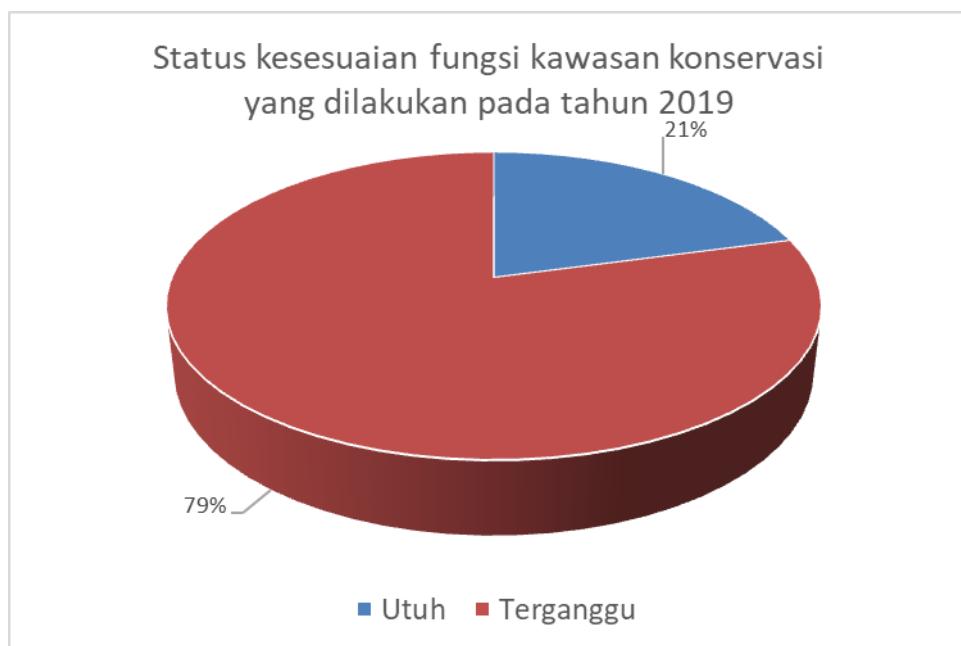
Tahun 2015 telah dilaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi dengan *desk study* pada 115 kawasan Taman Wisata Alam di seluruh Indonesia, pada tahun 2016 dilaksanakan pada 120 kawasan konservasi di Pulau Sumatera, kemudian pada tahun 2017 dilaksanakan pada 123 kawasan di pada region Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 2018 dilaksanakan kajian untuk kawasan di sebagian wilayah Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 111 kawasan. Untuk tahun 2019, evaluasi keseuaian fungsi dengan desk study dilaksanakan untuk region Maluku dan Papua pada 77 kawasan konservasi.

Kawasan yang dikaji dalam kajian evaluasi kesesuaian fungsi dengan metode *desk study* tahun 2019 pada kawasan konservasi region Maluku dan Papua dengan hasil rekapitulasi status kesesuaian fungsi untuk kawasan yang dikaji disajikan pada Tabel 11.



Tabel 11. Rekapitulasi status kesesuaian fungsi hasil kajian evaluasi kesesuaian fungsi

No	Status Kesesuaian Fungsi	Jumlah Kawasan	Persentase
1	Terganggu	16	20,78%
2	Utuh	61	79,22%
Total		77	100%



Gambar 11. Diagram Status Kesesuaian Fungsi Hasil EKF Desk Study Tahun 2019

Untuk tahun 2019, capaian jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia adalah sebanyak 77 unit kawasan atau 77,71 % dari target tahun 2019. Data terkait capaian kinerja pada IKK 2 dapat dilihat pada lampiran 6.

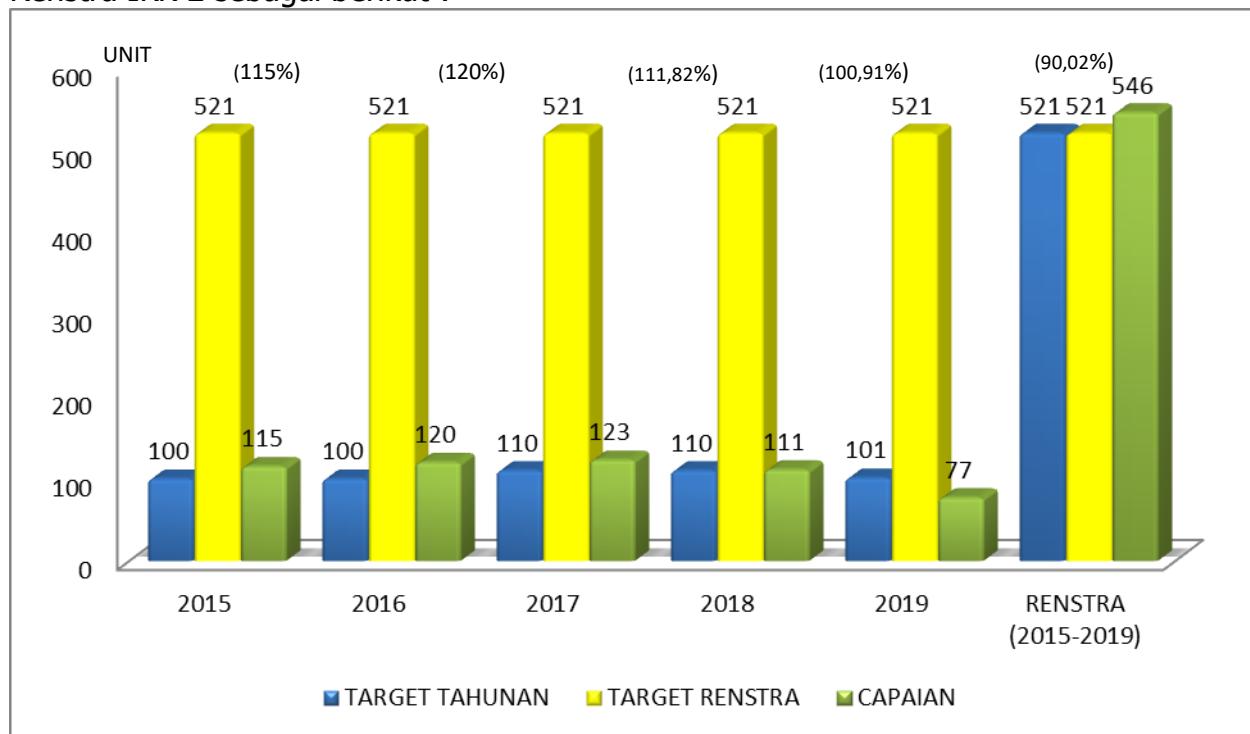
Jika dibandingkan dengan target jumlah kawasan konservasi (521 unit) yang harus di evaluasi, maka sampai dengan tahun 2019 telah dihasilkan rekomendasi terhadap 546 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia atau dengan kata lain telah direkomendasikan sebanyak 104,80% KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.



Tabel 12. Persentase Capaian Kinerja IKK 2 Tahunan dan Renstra

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Unit Rekomendasi EKF)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	100	521	115	115,00	22,07
2.	2016	100	521	120	120,00	45,11
3.	2017	110	521	123	111,82	68,71
4	2018	110	521	111	100,91	90,02
5	2019	101	521	77	76,24	104,80
	Total	521	521	546		

Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 2 sebagai berikut :



Gambar 12. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2

Dalam upaya mencapai IKK jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan EKF merupakan kewajiban yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Hal tersebut juga berimplikasi pada kesiapan UPT untuk mengalokasikan anggaran kegiatan EKF.



b. Data-data hasil inventarisasi lapangan yang masih kurang, sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada beberapa kawasan. Hal tersebut juga disebabkan oleh karena penyimpanan data hasil inventarisasi lapangan UPT tidak dilakukan secara terstruktur dan rapi.

Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- a. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE tentang pentingnya evaluasi kesesuaian fungsi dan pentingnya inventarisasi potensi kawasan guna pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi yang lebih komprehensif;
- b. Membuat sistem data base data hasil inventarisasi lapangan dan juga evaluasi kesesuaian fungsi.

A.3 IKK 3 : Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

Tabel 13. Pencapaian IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2019

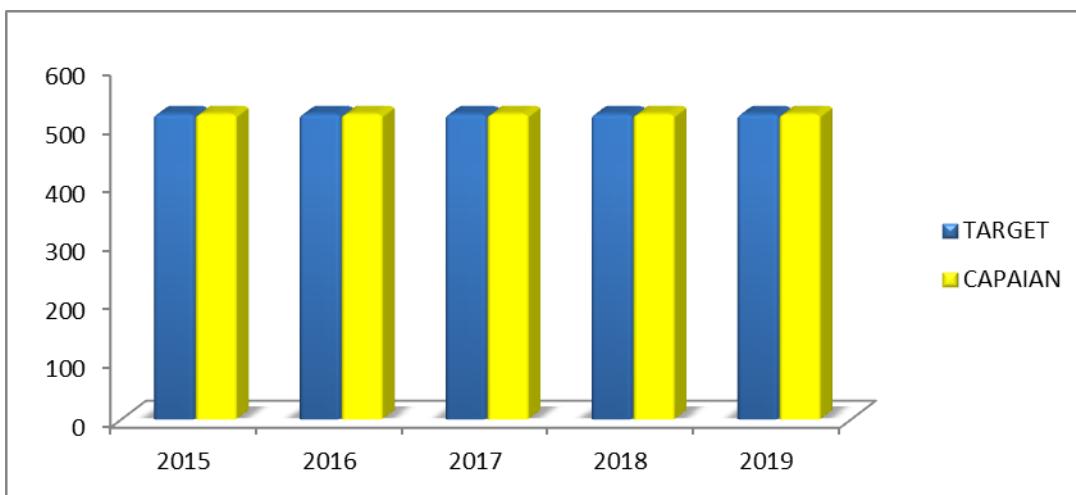
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2019	Realisasi IKK Tahun 2019	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	100	1.065.798.000	1.064.017.899	99,83

Tabel 14. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3

No.	Tahun	Target	Jumlah Paket Data	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1	2015	521	521	-
2	2016	521	521	-
3.	2017	521	521	-
4.	2018	521	521	-



Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 3 sebagai berikut :



Gambar 13. Diagram Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3

Persentase kenaikan/penurunan yang dicapai bernilai 0 atau tetap, karena target sepanjang tahun (2015 - 2019) konstan yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Hasil pengumpulan data dan peta potensi kawasan konservasi dikelompokkan, dianalisa, disimpan, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk aplikasi pengumpul data yang disebut SIPIKA (Sistem Informasi Direktorat PIKA). SIPIKA adalah sistem informasi yang memuat data hasil pelaksanaan tupoksi pada setiap subdit yang berada di Direktorat PIKA. SIPIKA dibuat berbasis online untuk mempermudah proses pertukaran data setiap subdit internal Direktorat PIKA. Data SIPIKA disimpan di server Subdit IIKA dan telah terhubung oleh jaringan publik sehingga sebagian datanya dapat diakses secara online pada alamat <http://sipika.ksdae.menlhk.go.id/>.

Pada tahun 2019 dikembangkan SIPIKA versi 3.0 yang berbasis website serta database inventarisasi dan informasi kawasan konservasi. Aplikasi SIPIKA versi 3.0 mampu mengakomodir kebutuhan Subdit dan Tata Usaha pada Direktorat PIKA karena telah dikembangkan dengan penambahan menu, *field* baru, dan fitur laporan, selain fitur-fitur yang sebelumnya sudah ada.



Gambar 14. Prototipe Aplikasi SIPIKA Versi 3.0

Tabel 15. Jumlah Paket Data dan Informasi KK Tahun 2015 – 2019

No.	Tahun	Target	Lokasi Satker	Keterangan
1.	2015	521 KK	53 TN 21 BKSDA (486 Kawasan) 28 Tahura	
2.	2016	521 KK	53 TN 21 BKSDA (486 Kawasan) 28 Tahura	
3.	2017	521 KK	53 TN 21 BKSDA (486 Kawasan) 28 Tahura	KK non TN terdiri dari CA, SM, TWA dan THR dan TB
4.	2018	521 KK	53 TN 21 BKSDA (486 Kawasan) 28 Tahura	
5.	2019	521 KK	53 TN 21 BKSDA (486 Kawasan) 28 Tahura	

Target IKK paket data adalah konstan dari tahun 2015 - 2019, yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Pengisian jenis data dalam paket data tiap tahun berbeda akan tetapi jumlah KK yang didata tetap yaitu 521 kawasan konservasi, oleh karenanya tidak bisa dilakukan penghitungan kenaikan/penurunan persentase paket data yang terkumpul. Capaian target bulanan paket data dapat dilihat pada lampiran 5.

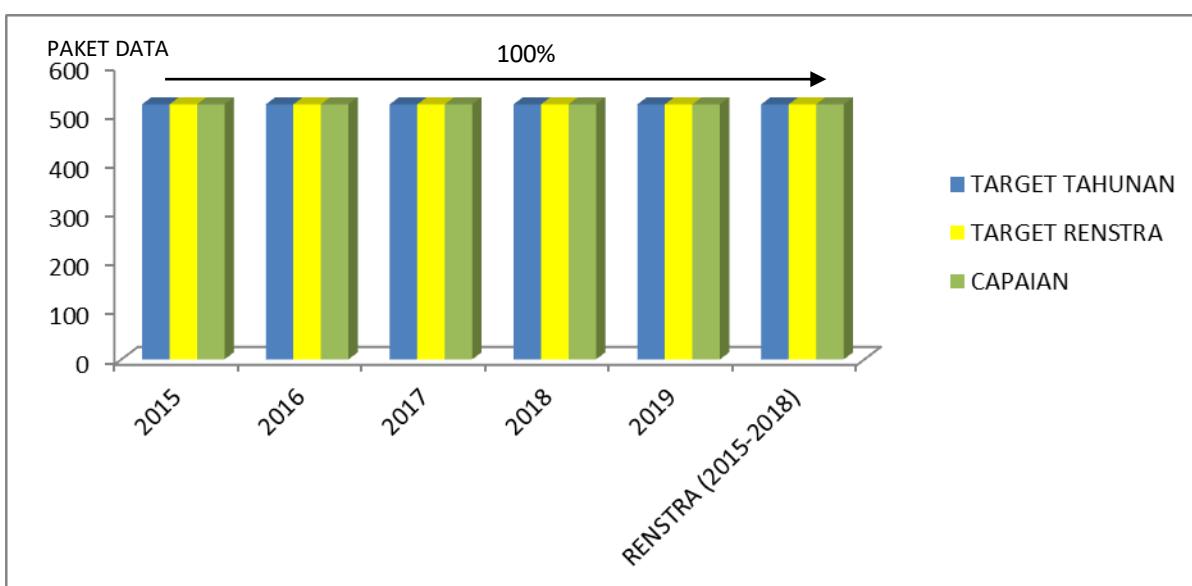
Perhitungan pencapaian IKK ini pada Capaian Renstra (2015-2019) tidak berupa akumulasi dari capaian tahunan, melainkan jumlah yang konstan karena indikator paket data adalah pemutakhiran paket data 521 kawasan konservasi.



Tabel 16. Persentase Capaian Kinerja IKK 3 Tahunan dan Renstra

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Paket Data KK)	% Capaian Tahunan	%Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	521	521	521	100	100
2.	2016	521	521	521	100	100
3.	2017	521	521	521	100	100
4.	2018	521	521	521	100	100
5.	2019	521	521	521	100	100
Total		521	521	521	100	100

Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 3 sebagai berikut :



Gambar 15. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 3

A.4 IKK 4 : Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diberi amanah untuk mengelola seluruh kawasan konservasi tersebut secara efisien dan lestari sesuai UU No 41 Tahun 1999 melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Meskipun secara organisasi, seluruh kawasan konservasi tersebut sudah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/Balai Taman Nasional, namun fakta di lapangan menunjukkan hampir seluruh kawasan konservasi terutama Non Taman Nasional belum dikelola secara optimal sampai tingkat tapak.



Penentuan target KPHK pada Renstra Direktorat PIKA dan Perjanjian Kinerja (PK) 2015-2019 sebesar 100 Unit KPHK. Target tersebut merupakan akumulasi dari target yang harus diselesaikan dalam 2 tahun yaitu 2015 dan 2016. Target 2015 dan 2016 semula pembentukan KPHK sebanyak 20 dan 80 unit setiap tahun selama periode Renstra 2015-2019. Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019, maka target pembentukan KPHK pada tahun 2015 dan 2016 disesuaikan menjadi sebanyak 40 dan 60 Unit KPHK yang terbentuk, dengan verifiernya adalah "Usulan Dirjen KSDAE kepada Menteri LHK tentang pembentukan KPHK dan SK Menteri LHK". Penentuan verifier dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa penetapan keputusan wilayah KPHK berada di luar kewenangan Ditjen KSDAE. Pada Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah KPH dikonsepkan oleh Ditjen PKTL, dengan demikian proses setelah penyampaian usulan KPHK oleh Dirjen KSDAE kepada Menteri tidak berada dalam kontrol atau kewenangan Ditjen KSDAE. Penyesuaian jumlah target KPHK dilakukan dengan pertimbangan agar pada akhir Renstra 2015-2019 semua KPHK yang dibentuk dapat beroperasi. Namun demikian di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE target yang tercantum belum berubah, yaitu untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing 20 unit dan 80 unit. Rencananya akan dilakukan review Renstra Ditjen KSDAE sehingga Direktorat PIKA mengusulkan untuk tahun 2015 dan 2016, jumlah unit KPHK yang terbentuk diusulkan menjadi 40 Unit dan 60 Unit KPHK. Target dan Data Usulan KPHK pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 17.



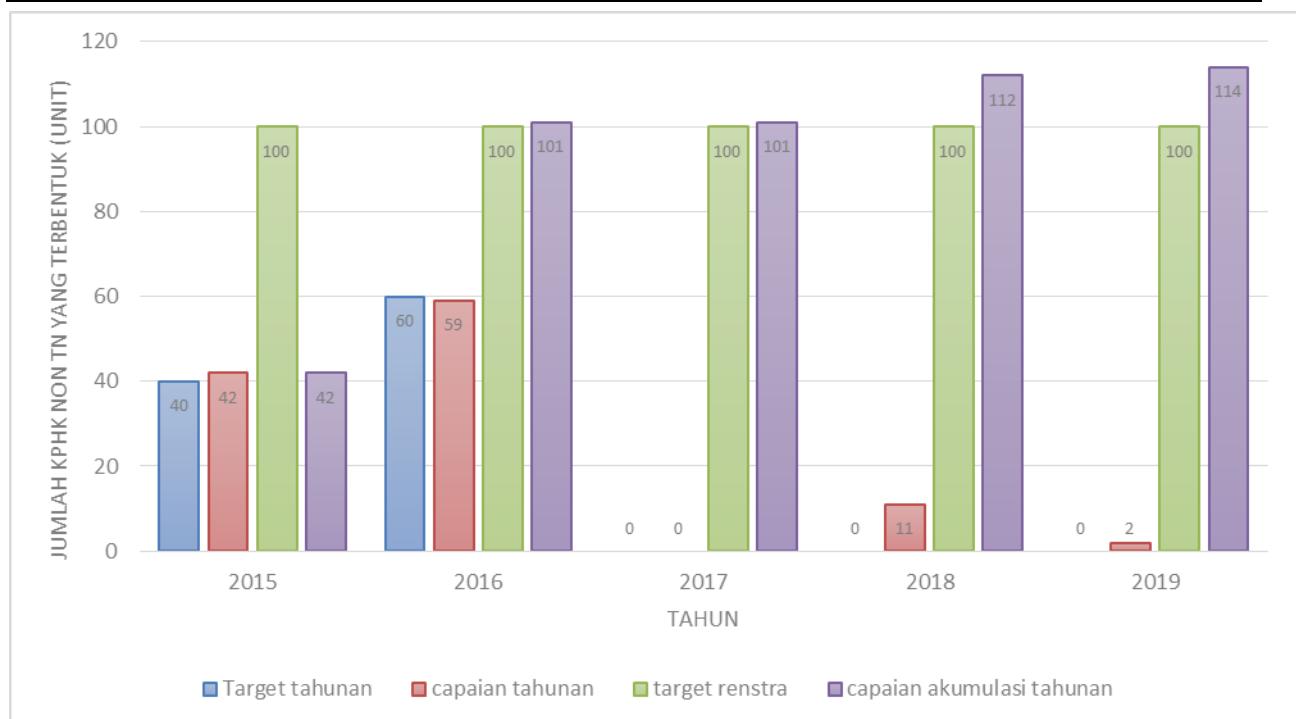
Tabel 17. Target dan Data Usulan KPHK Tahun 2015 - 2019

No.	Tahun	Target Renstra (Unit)	Target PK (Unit)	Pengusulan KPHK kepada Menteri (Unit)	Usulan KPHK berdasarkan fungsi TN dan Non TN (Unit)	
					TN	Non TN
1.	2015	40	40	42	-	42
2.	2016	100	60	59	-	59
3.	2017	100	100	-	-	-
4.	2018	100	100	12	1	11
5.	2019	100	100	3	1	2
Total		100	100	116	2	114

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 direncanakan terbentuk sebanyak 100 unit KPHK Non Taman Nasional baru. Namun demikian, target pembentukan KPHK Non Taman Nasional telah tercapai pada tahun 2016 sebanyak 101 usulan KPHK Non TN. Dengan tercapainya target IKK 4 pada tahun 2016, maka untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kegiatan lebih difokuskan untuk mendorong penerbitan penerbitan SK KPHK yang usulannya telah disampaikan kepada Menteri LHK, review terhadap KPHK yang telah terbentuk dan usulan pembentukan KPHK baru, baik KPHK TN maupun KPHK Non TN. Sampai dengan akhir tahun 2019, telah terdapat 114 usulan KPHK Non TN yang telah disampaikan kepada Menteri LHK. Persentase capaian kinerja tahunan terhadap target renstra dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :

Tabel 18. Persentase Capaian Kinerja IKK 4 Tahunan dan Renstra (KPHK Non TN)

No.	Tahun	Target Tahunan PK	Target Tahunan Renstra	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Unit KPHK Non TN)	% Capaian Tahunan	% Pencapaian Thdp Renstra (2015- 2019)
1.	2015	40	40	40	42	105	42
2.	2016	60	100	100	59	98,33	101
3.	2017	100	100	100	101	101	101
4.	2018	100	100	100	112	112	112
5.	2019	100	100	100	114	114	114
Total		100	100	100			



Gambar 16. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 4 (Pembentukan KPHK Non Taman Nasional)

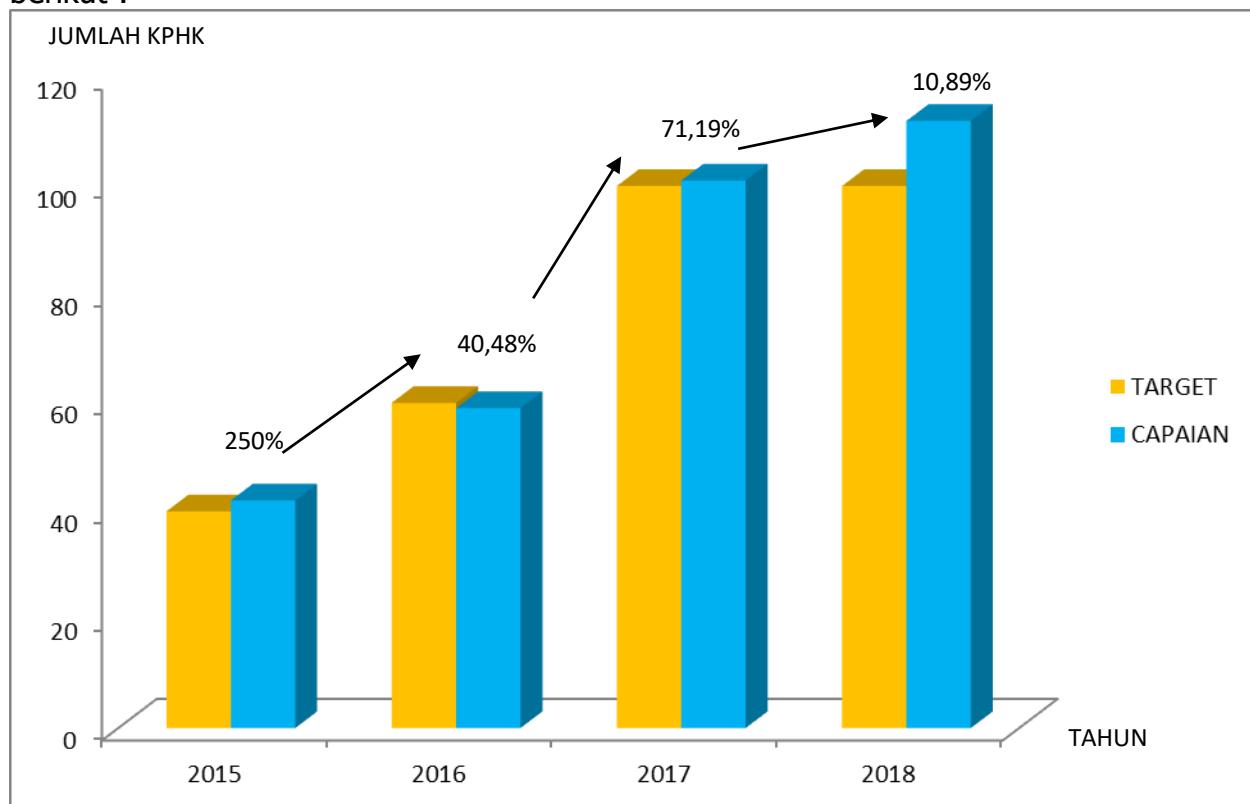
Untuk persentase kenaikan/penurunan pada IKK 4 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 19. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 4

No.	Tahun	Target	Jumlah KPHK Non TN Yang Diusulkan (unit)	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2015	40	42	250
2.	2016	60	59	40,48
3.	2017	100	101	71,19
4.	2018	100	112	10,89
5.	2019	100	114	1,78
Total		100	114	



Dapat juga dilihat pada gambar diagram kenaikan/penurunan capaian IKK 4 sebagai berikut :



Gambar 17. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian IKK 4

Dengan telah tercapainya target IKK 4 pada tahun 2016, maka untuk tahun 2019 target pada IKK 4 adalah terbentuknya 7 (tujuh) unit KPHK hasil review dan usulan baru. Berdasarkan terget tersebut, capaian pada tahun 2019 adalah sebanyak 3 (tiga) KPHK usulan baru, dan 36 (tiga puluh enam) KPHK hasil review. Sehingga total capaian target tahun 2019 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) unit KPHK. Capaian target kegiatan dan anggaran pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Pencapaian target tahun 2019 untuk IKK 4 Direktorat PIKA

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2019	Realisasi IKK Tahun 2019	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	7 Unit	39 Unit	557	680.820.000	655.300.642	96,25



Dalam pencapaian IKK Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2019, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Rancang Bangun Regional Timur

Kegiatan bimbingan teknis dilakukan di Swiss-Bell Hotel Sorong, dengan mengundang peserta dari UPT baik UPT KSDA maupun UPT Taman Nasional di wilayah timur (Papua, Papua Barat, dan Maluku). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan UPT terhadap rancangan wilayah KPHK regional timur yang telah disusun oleh Direktorat PIKA.

2. Bimbingan Teknis Penyusunan Rancang Bangun Wilayah Jawa dan Sumatera pada tahun 2019, kegiatan bimbingan teknis penyusunan rancang bangun wilayah Jawa dan Sumatera dilaksanakan pada 2 (dua) UPT, yaitu Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan Balai KSDA Bengkulu.

3. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi.

Pembinaan dan koordinasi dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang pemolaan. Pada tahun 2019 dilakukan pada 6 (enam) UPT, yaitu: Balai TN Wakatobi, Balai TN Kerinci Seblat, Balai KSDA Aceh, Balai TN Wakatobi, Balai TN Komodo, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, dan 6 (enam) lokasi, yaitu: Riau, Bandung, Banten, Sorong, Gorontalo, dan negara Filipina.

4. Monitoring dan Evaluasi KPHK dan Bidang Pemolaan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KPHK dan Bidang Pemolaan dilaksanakan ke Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. Kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi permasalahan pengukuhan pada UPT tersebut.

3. Review Penetapan KPHK

Review Penetapan KPHK dilaksanakan di Bandung pada bulan Desember 2019, dengan mengundang beberapa UPT KSDA dan UPT Taman Nasional di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan UPT terhadap rancangan wilayah KPHK yang telah disusun oleh Direktorat PIKA.

4. Penelusuran Dokumen Kawasan Konservasi dalam rangka Pembentukan KPHK

Kegiatan penelusuran dokumen kawasan konservasi dilakukan mengingat terdapat beberapa kawasan konservasi yang berdasarkan kesejarahannya ada tetapi secara



kondisi aktual belum dapat dikelola karena lokasinya belum ditemukan. Kegiatan penelusuran dokumen kawasan konservasi pada tahun 2019 dilakukan pada 8 lokasi, yaitu CA Getas di Provinsi Jawa Tengah, CA Baron di Provinsi DI Yogyakarta, CA Arcadomas dan CA Malabar di Provinsi Jawa Barat, CA Gua Ulu Tiangko di Provinsi Jambi, CA Bungamas Kikim di Provinsi Sumatera Selatan, CA Pulau Burung dan CA Pulau Laut di Provinsi Kepulauan Riau, dan SM Jamursbamedi di Provinsi Papua Barat.

Dari 116 usulan KPHK yang telah disampaikan kepada Menteri LHK sampai dengan tahun 2019, yang dari 114 usulan KPHK Non TN dan 2 usulan KPHK TN, 99 (Sembilan puluh sembilan) usulan KPHK yang telah terbit SK Penetapannya, yang terdiri dari 98 (Sembilan puluh delapan) SK KPHK Non TN dan 1 (satu) SK KPHK TN.

Selain itu, terdapat 1 (satu) usulan yang tidak dilanjutkan prosesnya karena proses perubahan fungsi kawasan hutan dari fungsi awal sebagai Suaka Marga satwa menjadi Taman Nasional, dan 6 (enam) usulan KPHK yang prosesnya belum selesai. Keenam usulan KPHK yang belum selesai proses penetapannya yaitu KPHK Isau-Isau di Provinsi Sumatera Selatan, KPHK Gunung Api Banda di Provinsi Maluku, KPHK Lembah Anai di Provinsi Sumatera Barat, KPHK Semaku dan KPHK Semidang Bukit Kabu di Provinsi Bengkulu dan KPHK TN Tambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhadap KPHK Isau-isau, KPHK Gunung Api Banda dan KPHK Lembah Anai belum dapat ditetapkan karena masih ada ketidakjelasan status dan fungsi salah satu unit kawasan penyusun KPHK, sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Sedangkan untuk 3 usulan KPHK lainnya masih dalam proses penelaahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pembentukan KPHK, baik KPHK TN maupun KPHK Non TN, beberapa kegiatan yang terus dilakukan antara lain:

- a. Penyelesaian pedoman pembentukan KPHK;
- b. Mendorong penetapan KPHK yang telah diusulkan kepada Menteri LHK dan menyelesaikan permasalahan kawasan konservasi yang menjadi kendala dalam penetapan wilayah KPHK Isau-isau di Provinsi Sumatera Selatan, KPHK Gunung Api Banda di Provinsi Maluku, dan KPHK Lembah Anai di Provinsi Sumatera Bara, yang hingga saat ini masih dalam proses penelaahan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;



-
- c. Mendorong UPT untuk mengusulkan rancang bangun KPHK terhadap kawasan-kawasan yang belum menjadi KPHK;
 - d. Memproses usulan KPHK baru serta melakukan review terhadap SK Penetapan KPHK.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK adalah:

- 1. Permasalahan dalam hal pengukuhan kawasan sebagai unit pembentukan KPHK;
- 2. Belum dipahaminya materi penyusunan rancang bangun KPHK oleh UPT lingkup KSDAE;
- 3. Belumadanya pedoman dalam pembentukan KPHK, terutama untuk KPHK Tahura;
- 4. UPT pengelola Tahura belum mendapatkan pendampingan dalam pembentukan KPHK.

Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam pencapaian IKK ini adalah:

- 1. Perlu ditindaklanjuti penyelesaian permasalahan kawasan hutan konservasi, terkait pengukuhan kawasan, untuk mendorong pembentukan KPHK dan review terhadap SK Penetapan Wilayah KPHK;
- 2. Perlu dilakukan koordinasi dengan Ditjen PKTL dalam upaya percepatan penerbitan SK Pembentukan KPHK, dan terkait upaya percepatan penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan konservasi;
- 3. Penyusunan peraturan tentang Pembentukan KPHK;
- 4. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE dan UPT Tahura;
- 5. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendampingan perlu dilakukan lebih intensif;
- 6. Perlunya pendampingan dan alokasi anggaran baik untuk UPT lingkup Ditjen KSDAE, maupun UPT pengelola Tahura dalam rangka pembentukan KPHK.

A.5 IKK 5: Jumlah Kerja Sama Pembangunan Strategis dan Kerja Sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS.

Dalam upaya mendukung tata kelola pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah telah membuka ruang kerja sama penyelenggaraan di KSA dan KPA berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.

Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.



Gambar 18. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen KSDAE dengan BPPT tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dilakukan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Sistem Deteksi Dini Ancaman Tsunami Selat Sunda untuk Mitigasi Bencana Gunung Anak Krakatau di CA dan CAL Kepulauan Krakatau, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 15 Maret 2019 di Jakarta

Kerja Sama penyelenggaraan KSA dan KPA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi:

- a. Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan



b. Kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan.

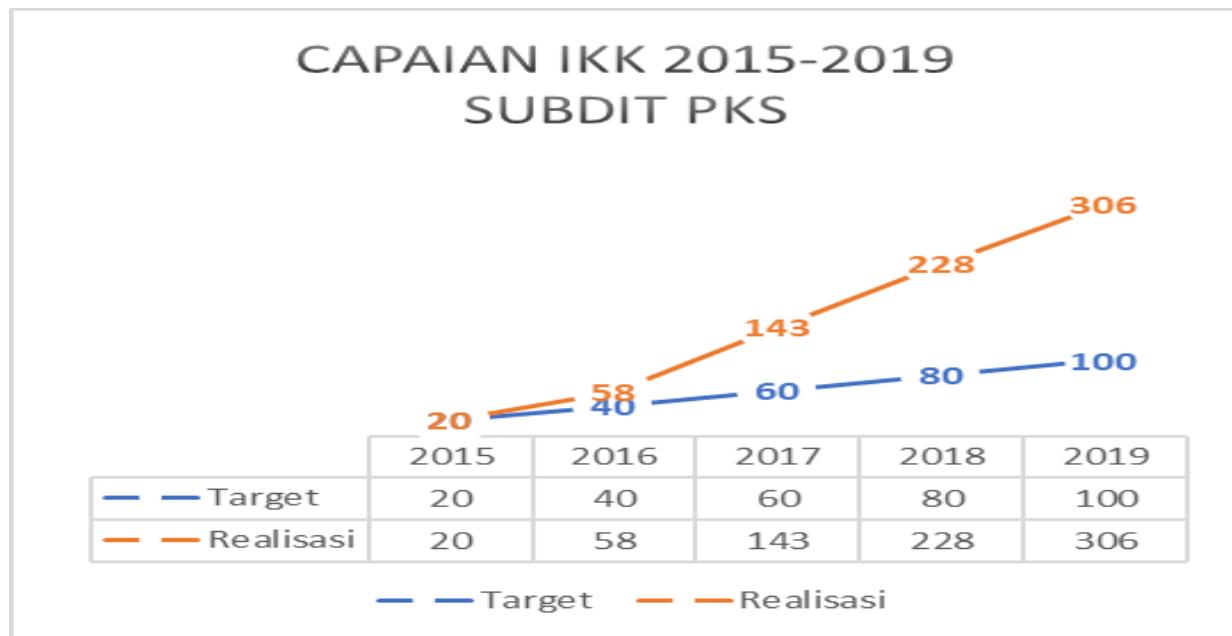
Tabel 21. Pencapaian IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2018	Realisasi IKK Tahun 2018	% Realisa si IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	78 PKS	390	400.000.000	399.507.130	99,88

Tabel 22. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5 Periode 2015-2019

No.	Periode Tahun	Target PKS Per Tahun	Realisasi Jumlah PKS	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2015	20	20	-
2.	2016	20	38	190
3.	2017	20	85	224
4.	2018	20	85	0
5.	2019	20	78	-8,23
TOTAL		100	306	

Kenaikan capaian kinerja IKK 5 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 19. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5

Sesuai dengan Renstra yang memiliki target PKS sebanyak 20 per tahun, maka sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis



memiliki target akumulasi sebanyak 306 (tiga ratus enam) dokumen Perjanjian Kerja Sama atau 306%, terdiri atas:

- a. Tahun 2015 sebanyak 20 PKS;
- b. Tahun 2016 sebanyak 38 PKS;
- c. Tahun 2017 sebanyak 85 PKS;
- d. Tahun 2018 sebanyak 85 PKS, dan
- e. Tahun 2019 sebanyak 78 PKS.

Khusus pada tahun 2019, telah diselesaikan 78 naskah Perjanjian Kerja Sama dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

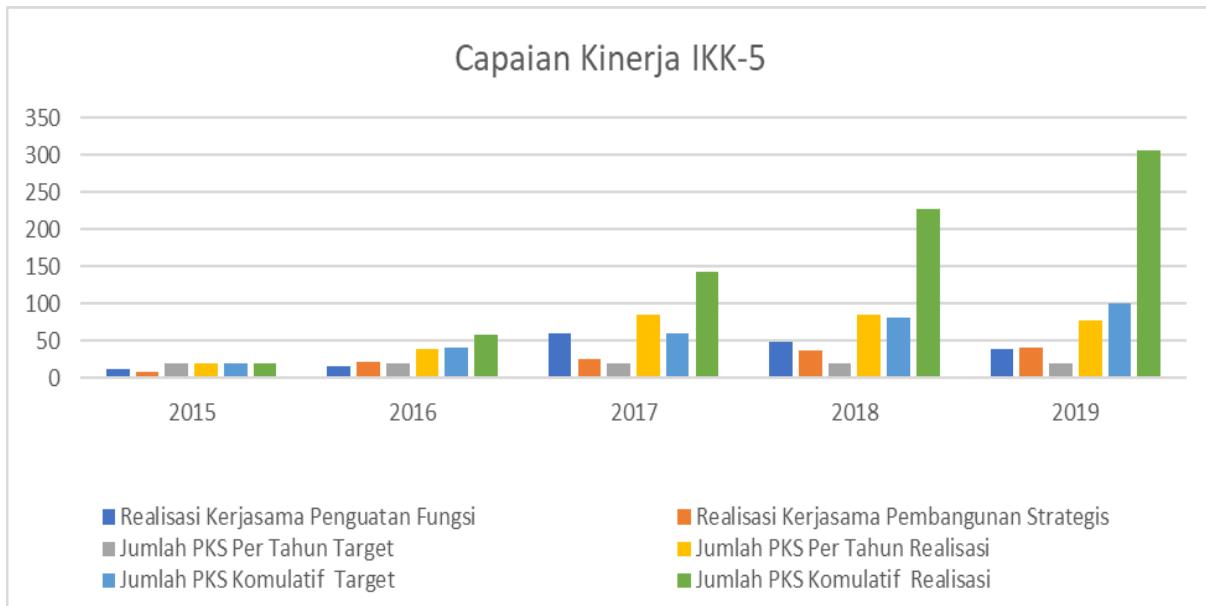
Tabel 23. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah
A. Kerjasama Penguatan Fungsi		
1.	Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani	38
B. Kerjasama Pembangunan Strategis		
1.	Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani	28
2.	Sudah ada Persetujuan Menteri, PKS dalam proses	43
3.	Proses Persetujuan ke Menteri	6
4.	Proses Penelaahan Staf	12
5.	Melengkapi Persyaratan Psl. 26 P.85/2014 Jo. P.44/2017	44
6.	Permohonan ditolak	1
7.	Belum Ada Permohonan	9

Tabel 24. Persentase Capaian Kinerja IKK 5 Tahunan dan Renstra

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK PKS	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	20	100	20	100	20
2.	2016	20	100	38	190	145
3.	2017	20	100	85	425	238
4.	2018	20	100	85	425	285
5.	2019	20	100	78	390	306
Total		100	100	306	306	

Dengan tercapainya jumlah kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 306 PKS (2015-2019), maka persentase yang telah dicapai sebesar 306%.



Gambar 20. Diagram Capaian Kinerja IKK 5 Periode 2015-2019

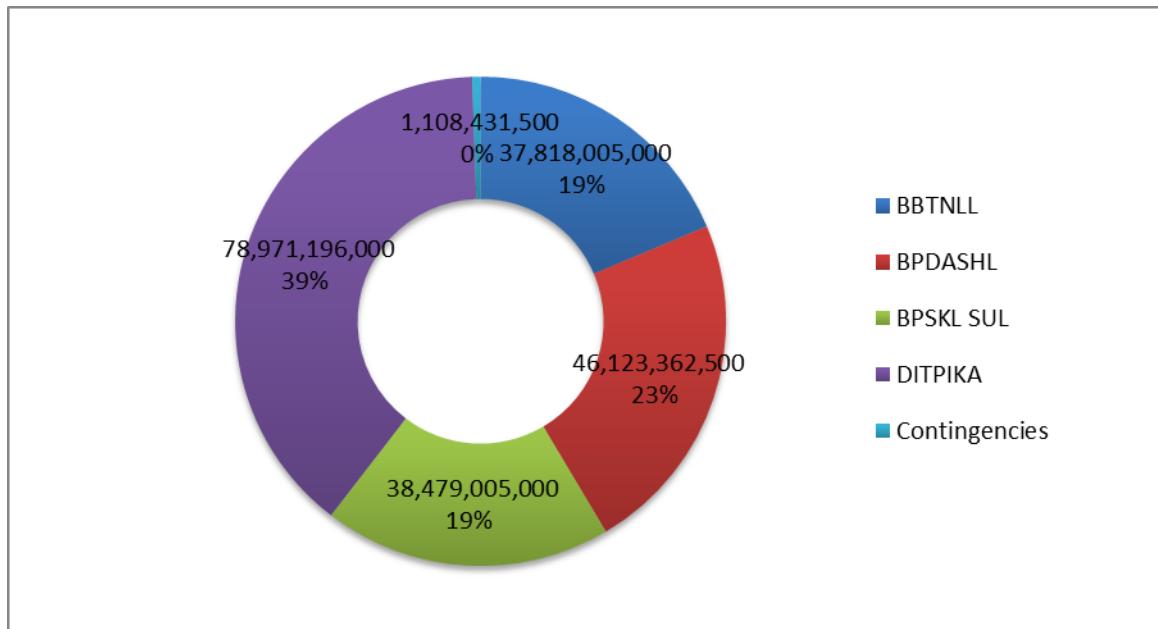
A.6 ***Forest Programme III - Sulawesi***

Berdasarkan Keputusan Sekertaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 95/Setjen-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan Executing Agency Proyek Kerjasama Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan Direktorat PIKA sebagai *Project Executing Agency Forest Programme III – Sulawesi*.

Proyek ini dimulai pada akhir tahun 2016, dimana realisasi Direktorat PIKA saat ini hanya berupa pencairan *advance payment* (pembayaran uang muka) untuk konsultan.

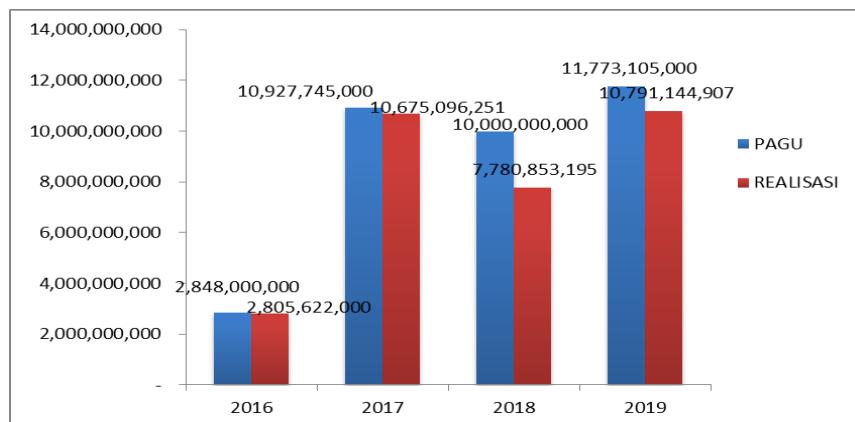
Dalam pelaksanaan kegiatannya, selaku PEA, Direktorat PIKA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di tingkat *Project Implementing Unit*, yaitu Balai Besar TN Lore Lindu, Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Palu Poso, dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sulawesi.

Forest Programme III – Sulawesi dilaksanakan selama 7 tahun (2016 – 2023), dengan total hibah sebesar 13,5 juta euro, dan dana pendamping dari pemerintah RI minimal 10% dari total hibah. Adapun pembagian anggaran hibah yang ada di PEA dan PIU tersaji pada Gambar 21 sebagai berikut:



Gambar 21. pembagian anggaran hibah yang ada di PEA dan PIU

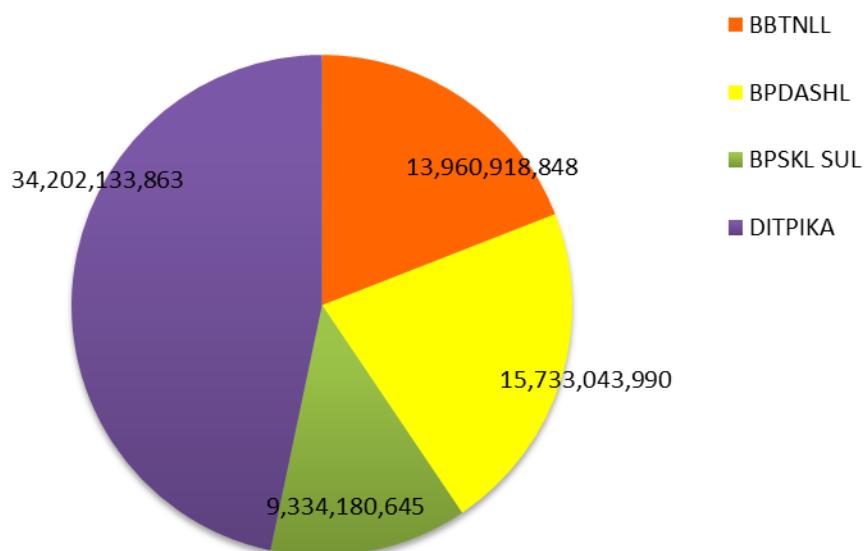
Realisasi Direktorat PIKA selaku PEA dari tahun 2016 hingga 2019 dapat dilihat pada Gambar 22 berikut:



Gambar 22. Realisasi Direktorat PIKA selaku PEA dari tahun 2016 hingga 2019
Data realisasi seluruh proyek *Forest Programme III – Sulawesi* yang ada di PEA dan PIU terdapat pada Gambar 23 sebagai berikut:

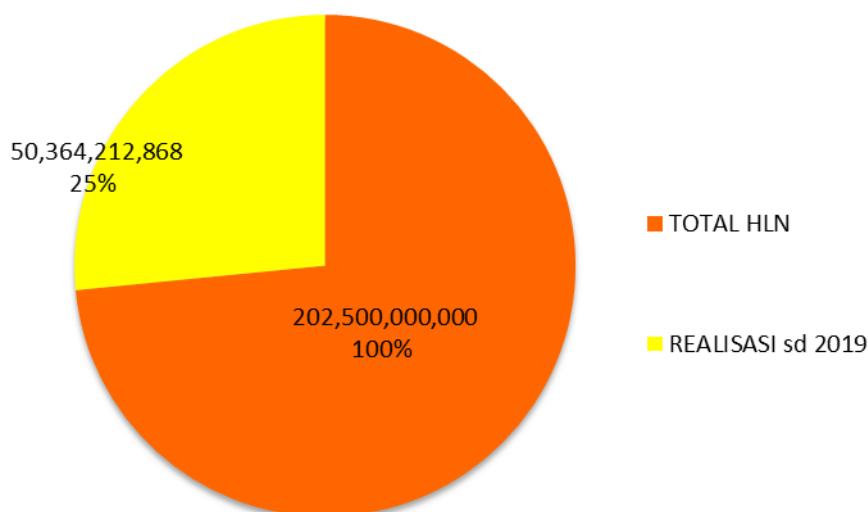


DATA REALISASI



Gambar 23. Data realisasi seluruh proyek FP III yang ada di PEA dan PIU

Memasuki tahun ke tiga pelaksanaan *Forest Programme III – Sulawesi*, baru sekitar 25% dana Hibah Luar Negeri yang terserap (Rp.50.364.212.868,-), seperti tersaji pada Gambar 24 berikut:



Gambar 24. Diagram Serapan Dana HLN
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan *Forest Programme III – Sulawesi* ini adalah:



-
1. Seluruh kegiatan proyek dilaksanakan sepenuhnya oleh ASN Direktorat PIKA ataupun ASN yang ada di masing-masing PIU, ini merupakan permasalahan utama karena keterbatasan jumlah, waktu dan biaya dari Satker tersebut. Selain mengerjakan tugas pokok utama, Satker juga harus mengerjakan kegiatan proyek.
 2. Pelaksana proyek tersebar di 3 (tiga) Eselon I, sehingga dibutuhkan waktu dan energi yang cukup besar untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan.
 3. Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek *Forest Programme III – Sulawesi* adalah peraturan KfW dan *Project Implementing Manual (PIM)* yang membutuhkan waktu untuk memahami dan melaksanakannya.

Strategi penyelesaiannya adalah:

1. Sedang diusulkan restrukturisasi pelaksanaan proyek *forest Programme III – Sulawesi*, yang nantinya akan ada *National Project Officer* dan perangkat lainnya, yang akan melaksanakan secara penuh kegiatan FP III di bawah perintah PEA/Direktorat PIKA.
2. Perlu dilaksanakan pertemuan-pertemuan rutin dan rapat koordinasi antara PEA, PIU dan konsultan.
3. Telah dilakukan pelatihan untuk memahami aturan-aturan KfW dan PIM kepada PEA dan PIU.



B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian IKK Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2019, Direktorat PIKA telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.19.509.334.000,-. Secara umum realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2019 sebesar Rp. 18.346.245.533,- atau 94,04% dari total anggaran sebesar Rp. 19.509.334.000,-. Sebagaimana disajikan pada tabel 28 dibawah ini.

Tabel 25. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2019

No	Kegiatan/IKK	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem				
1	Layanan Perkantoran	1.539.000.000	1.472.498.797	95,68
Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				
2	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	803.300.000	798.935.800	99,46
3	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	1.020.000.000	1.019.193.937	99,92
4	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	1.065.798.000	1.064.017.899	99,83
5	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	680.820.000	655.300.642	96,25
6	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	400.000.000	399.507.130	99,88
7	Forest Programme III (Direktorat PIKA)	12.950.416.000	11.904.100.761	91,92
8	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	50.000.000	44.603.600	89,21
9	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.000.000.000	988.086.967	98,81
TOTAL		19.509.334.000	18.346.245.533	94,04



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA tahun 2019 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja guna mengetahui keberhasilan/kegagalan organisasi Direktorat PIKA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Capaian kinerja Direktorat PIKA tersaji sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian akumulasi IKK Renstra (2015-2019) sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 272,86 %, realiasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2019 sebesar 94,04%.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok) tahun 2019 adalah 110 dokumen dari target 64 dokumen (171,88 %), Capaian Kinerja s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 397 dokumen dari target 150 dokumen (264,67%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 99,45%.
3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2019 adalah 77 unit dari target 53 unit rekomendasi (76,23%), Capaian Kinerja s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 546 unit dari target 521 unit rekomendasi (104,80%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 99,92%.
4. Capaian Kinerja IKK 3 (Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang *Valid* dan *Reliable* pada 521 KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2019 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), Capaian Kinerja s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 3 sebesar 99,83%.
5. Capaian Kinerja IKK 4 (Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang Terbentuk Sebanyak 100 Unit KPHK) tahun 2019 adalah 114 usulan dari target Renstra 100 unit usulan KPHK (114%). Capaian Kinerja



s.d tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah 114 dari target 100 unit usulan KPHK (114%) dan realisasi anggaran pada IKK 4 sebesar 96,25%.

6. Capaian Kinerja IKK 5 (Jumlah Kerja Sama Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dan Kerja Sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS) tahun 2019 adalah 78 PKS dari target 20 PKS (390%), Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2019 Renstra 2015-2019 adalah **306 PKS dari target 100 PKS (306%)**, dan realisasi anggaran pada IKK 5 sebesar 99,88%.
7. *Forest Programme III – Sulawesi*

Kegiatan *Forest Programme III – Sulawesi* tahun 2019 sebanyak 15 jenis kegiatan, yang terealisasi sebanyak 13 kegiatan, yang terealisasi yaitu Finansial Audit yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (KAP Sutarmaji), Planning workshop, Publikasi kegiatan FP III, Pembayaran konsultan (4 kali dalam 1 tahun), pelatihan dan lokakarya (pelatihan drone tingkat lanjut, pelatihan analisa jaringan sosial, dan pelatihan monitoring FP III), Koordinasi FP III yang dilaksanakan ke beberapa lokasi Fasilitasi pelaksanaan FP III di lokasi proyek, monitoring dan evaluasi kegiatan FP III dari *Project Executing Agency* ke *Project Implementing Unit*, Honorarium pelaksana FP III selama 11 bulan, *National Steering Committee* yang pertama kali dilaksanakan, konsinyasi pemantapan struktur FP III, studi banding yang dilaksanakan ke Srambah Park, Mojosemi Park dan SM Paliyan di Yogyakarta, dan yang terakhir adalah *international tour* yang dilaksanakan ke Negara Jerman dan Negara Paris (menghadiri *MAB meeting*). Sedangkan kegiatan yang tidak terealisasi adalah pembayaran awal untuk kegiatan penelitian. Kegiatan ini tidak bisa dibayarkan karena proposal yang diajukan oleh konsorsium penelitian (Universitas Gottingen, IPB University, dan Universitas Tadulako) masih perlu direvisi, dan belum dikembalikan ke Ditrektorat PIKA hingga pertengahan Desember 2019. Kegiatan lainnya yang tidak terealisasi adalah monitoring eksternal, karena ToR / SOP-nya belum disetujui oleh KfW.



Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2019 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pemberian bantuan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1.

MATRIK KEGIATAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015-2019		Satuan	Target Kinerja (Volume dan Satuan) per Tahun				
				Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konser vasi yang tersusun dan men dapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok <ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan NSPKb. Bimbingan Teknis dan Supervisic. <i>Pembinaan dan Koordinasi</i>d. <i>Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok</i>e. <i>Monitoring dan Evaluasi</i>	Dokumen	30	60	90	120	150
				2. Peningkatan penerimaan PNBP dan pemanfaatan jasalungkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. <ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan NSPKb. Bimbingan Teknis dan Supervisic. Pembinaan dan Koordinasid. Verifikasi Hasil Evaluasie. Monitoring dan Evaluasi	Unit	100	200	310	420	521
					3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	521	521	521	521	521



				a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Pembangunan Sistem IKA e. <i>Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA</i>								
				4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK a. Penyusunan NSPK b. Bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pembinaan dan Koordinasi d. Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK e. Penilaian Rancang Bangun KPHK f. Penetapan KPHK g. Monitoring dan Evaluasi	Unit	20	100	100	100	100	100	
				5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS a. Penyusunan NSPK b. <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi</i> c. <i>Pembinaan dan Koordinasi</i> d. <i>Monitoring dan Evaluasi</i>	PKS	20	40	60	80	100		
				6. Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan KK kedalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa a. Penyusunan NSPK b. <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi</i> c. <i>Pembinaan dan Koordinasi</i> d. Finalisasi OMP	KK	-	-	551	551	-		



Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
Jabatan : Direktur Pemelajaran dan Informasi Konservasi Alam

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2018

Direktur,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	53 Unit KK
		Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	64 Dokumen
		Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.	521 Paket Data
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	7 KPHK
		Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Anggaran :

Rp. 1.539.000.000,-

Rp. 18.120.334.000,-

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Direktur,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001



**TARGET TRIWULANAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	-	-	53 Unit KK	53 Unit KK
		Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	15 Dokumen	30 Dokumen	45 Dokumen	64 Dokumen
		Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.	Finalisasi paket data untuk 138 Kawasan Konservasi			
		Jumlah Reviu Penetapan 100 Unit KPHK dan Usulan Baru	-	-	4 KPHK	7 KPHK
		Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	5 PKS	10 PKS	15 PKS	20 PKS

Jakarta, Desember 2018

Direktur,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001



Lampiran 3 : Data Capaian Penataan Zonasi/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2019

No	Fungsi	Kawasan	Provinsi	UPT	Nomor SK	Ket
1	CA	CA Talaga Patengen	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.7/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 10 Januari 2019	
2	SM	SM Balai Raja	Riau	BBKSDA Riau	SK.5/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 10 Januari 2019	
3	SM	SM Tasik Tanjung Padang	Riau	BBKSDA Riau	SK.6/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 10 Januari 2019	
4	CA	CA Padang Luway	Kalimantan Timur	BKSDA Kaltim	SK.12/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 16 Januari 2019	
5	SM	SM Pulau Semama	Kalimantan Timur	BKSDA Kaltim	SK.10/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 16 Januari 2019	
6	SM	SM PLG Sebanga	Riau	BBKSDA Riau	SK.13/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 16 Januari 2019	
7	TN	TN Tesso Nilo	Riau	BTN Tesso Nilo	SK.11/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 16 Januari 2019	
8	TN	TN Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	BTN Taka Bonerate	SK.23/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 23 Januari 2019	
9	TN	TN Gunung Palung	Kalimantan Barat	BTN Gunung Palung	SK.28/KSDAE/SET/KSA.0/2/2019 tanggal 6 Februari 2019	
10	CA	CA Yunghun	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.21/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 23 Januari 2019	
11	CA	CA Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur	BKSDA Kaltim	SK.24/KSDAE/SET/KSA.0/1/2019 tanggal 31 Januari 2019	
12	CA	CA Faruhumpenai	Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulsel	SK.33/KSDAE/SET/KSA.0/2/2019 tanggal 6 Februari 2019	
13	SM	SM Lamandau	Kalimantan Tengah	BKSDA Kalteng	SK.34/KSDAE/SET/KSA.0/2/2019 tanggal 7 Februari 2019	
14	THR	THR Pocut Meurah Intan	Aceh	UPTD THR PMI	SK.78/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tanggal 13 Maret 2019	
15	CA	CA Pasar Talo	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	SK.79/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tanggal 13 Maret 2019	
16	CA	CA Seluma	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	SK.74/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tanggal 6 Maret 2019	
17	CA	CA Bukit Saput Hawung	Kalimantan Tengah	BKSDA Kalsel	SK.94/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tanggal 28 Maret 2019	
18	THR	THR Nuraksa	Nusa Tenggara Barat	UPTD THR Nuraksa	SK.73/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tanggal 6 Maret 2019	
19	THR	THR Suawesi Tengah	Sulawesi Tengah	UPTD THR Sulteng	SK.95/KSDAE/SET/KSA.0/3/2019 tanggal 28 Maret 2019	
20	CA	CA Peson Subah	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.109/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 4 April 2019	
21	CA	CA Bantarbolang	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.112/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 4 April 2019	
22	CA	CA Kecubung Ulolanang	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.110/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 4 April 2019	
23	CA	CA Telogo Dringo	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.111/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 4 April 2019	
24	CA	CA Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.124/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 15 April 2019	
25	CA	CA Moga	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.125/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 15 April 2019	
26	TN	TN Bunaken	Sulawesi Utara	BTN Bunaken	SK.126/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 15 April 2019	
27	CA	CA Curug Bengkawah	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.119/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 15 April 2019	
28	CA	CA Peson Subah II	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.122/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 10 April 2019	
29	CA	CA Pringombo I	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.120/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 10 April 2019	
30	CA	CA Pringombo II	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.120/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 10 April 2019	
31	TWA	TWA Tanjung Tampa	Nusa Tenggara Barat	BKSDA NTB	SK.128/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 15 April 2019	
32	TWA	TWA Danau Tes	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	SK.168/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 6 Mei 2019	



33	TWA	TWA Air Hitam	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	SK.167/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 6 Mei 2019	
34	CA	CA Telogo Sumurup	Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah	SK.152/KSDAE/SET/KSA.0/4/2019 tanggal 24 April 2019	
35	CA	CA Pasar Ngalam	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	SK.163/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 3 Mei 2019	
36	CA	CA Mukomuko	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	SK.164/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 3 Mei 2019	
37	TN	TN Bukit Duabelas	Jambi	BTN Bukit Duabelas	SK.191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019	
38	TN	TN Gunung Leuser	Aceh, Sumatera Utara	BBTN Gunung Leuser	SK.193/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019	
39	THR	THR Lapak Jaru	Kalimantan Tengah	UPTD THR Lapak Jaru	SK.188/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 14 Mei 2019	
40	CA	CA Gunung Abang	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.218/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
41	SM	SM Pulau Nusa Barung	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.217/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
42	SM	SM Gunung Sawal	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.220/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
43	CA	CA Martelu Purba	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.204/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
44	SM	SM Barumun	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.221/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
45	TB	TB Pulau Pini	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.198/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
46	CA	CA Aek Liang Balik	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.207/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
47	SM	SM Gunung Raya	Sumatera Selatan	BKSDA Sumatera Selatan	SK.222/KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
48	TWA	TWA Deleng Lancuk	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.235 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal Juni 2019	
49	CA	CA Dolok Sulut	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.234 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal Juni 2019	
50	TWA	TWA Air Putih Kelok 9	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	SK.311/KSDAE/SET/KSA.0/7/2019 tanggal 17 Juli 2019	
51	SM	SM Pulau Dolongan	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulawesi Tengah	SK.197 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
52	CA	CA Pancur Ijen I	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.219 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
53	CA	CA Pancur Ijen II	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.219 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
54	TWA	TWA Sijaba Hutaginjang	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.185 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 14 Mei 2019	
55	THR	THR Bukit Barisan	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.200 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
56	CA	CA Pulau Dua	Banten	BBKSDA Jawa Barat	SK.243/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
57	CA	CA Sukawayana	Jawa barat	BBKSDA Jawa Barat	SK. 245/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
58	SM	SM Siranggas	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.246 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
59	CA	CA Watu Ata	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.268/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
60	CA	CA Takokak	Jawa Barat	BBKSDA Jawa barat	SK.247 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
61	CA	CA Gunung Tukung Gede	Banten	BBKSDA Jawa barat	SK.248 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
62	TWA	TWA Gunung Parmisan	Bangka Belitung	BKSDA Sumsel	SK.232 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
63	SM	SM Dolok Surungan	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.249 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
64	CA	CA Dolok Sipirok	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.250 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
65	CA	CA Goa Nglirip	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SK.251 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
66	CA	CA Telaga Warna	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.252 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
67	CA	CA Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.253 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
68	TWA	TWA Klamono	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.254 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
69	CA	CA Pulau Misool	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.255 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
70	CA	CA Pulau Salawati	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.256 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
71	TWA	TWA Bipolo	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.257 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	



72	CA	CA Wolo Tado	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.258 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
73	CA	CA Pegunungan Arfak	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.259/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
74	CA	CA Batang Palupuh	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	SK.263 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2019	
75	CA	CA Maninjau	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	SK.264 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 24 Juni 2019	
76	CA	CA Pulau Batanta Barat	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.269 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019	
77	SM	SM Pinjan Tanjung Matop	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulteng	SK.270 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019	
78	CA	CA Hutan Pinus Jhantoi	Aceh	BKSDA Aceh	SK.273 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019	
79	THR	THR Sultan Syarif Hasyim	Riau	UPTD THR Sultan Syarif Hasyim	SK.274 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019	
80	CA	CA Dolok Sibual Buali	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.277 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019	
81	CA	CA Batu Gajah	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.233 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
82	CA	CA Batu Ginurit	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.297/KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 28 Juni 2019	
83	CA	CA Batang Pangean II	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	SK.299 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 28 Juni 2019	
84	TN	TN Gunung Maras	Bangka Belitung	BKSDA Sumatera Selatan	SK.242 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
85	CA	CA Batang Pangean I	Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat	SK.244 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019	
86	CA	CA Tanjung Api	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulteng	SK.201 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
87	SM	SM Lombuyan	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulteng	SK.205 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
88	CA	CA Pati-pati	Sulawesi Tengah	BKSDA Sulteng	SK.203 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 24 Mei 2019	
89	THR	THR Pancoran Mas Depok	Jawa Barat	Dinas LH dan Kebersihan Depok	SK.318/KSDAE/SET/KSA.0/7/2019 tanggal 17 Juli 2019	
90	SM	SM Kateri	Nusa Tenggara Timur	BBKSDA NTT	SK.309/KSDAE/SET/KSA.0/7/2019 tanggal 17 Juli 2019	
91	TN	TN Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	BBTNBTS	SK.355KSDAE/SET/KSA.0/8/2019 tgl 19 Agustus 2019	
92	CA	CA Pegunungan Fakfak	Papua Barat	BBKSDA Papua Barat	SK.271 /KSDAE/SET/KSA.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019	
93	TWA	TWA Lau Debuk-Debuk	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.349 /KSDAE/SET/KSA.0/8/2019 tgl 12 Agustus 2019	
94	CA	CA Air Alas	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.372 /KSDAE/SET/KSA.0/9/2019 tgl 12 Sept 2019	
95	TWA	TWA Holiday Resort	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.374 /KSDAE/SET/KSA.0/9/2019 tgl 11 Sept2019	
96	TN	TN Sembilang	Sumatera Selatan	BTN Berbak Sembilang	SK.373/KSDAE/SET/KSA.0/9/2019 tgl 12 September 2019	
97	TN	TN Gunung Halimun Salak	Jawa Barat dan Banten	BTN Halimun Salak	SK.375/KSDAE/SET/KSA.0/9/2019 tgl 12 September 2019	
98	THR	THR Bukit Soeharto	Kalimantan Timur	UPTD THR Bukit Soeharto	SK.415/KSDAE/SET/KSA.0/10/2019 tgl 15 Oktober 2019	
99	TN	TN Bukit Barisan Selatan	Lampung, Bngkulu	BBTN BBS	SK.410/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2019 tgl 11 Oktober 2019	
100	CA	CA Pulau Sempu	Jawa Timur	BBKSDA Jatim	SK.224 /KSDAE/SET/KSA.0/5/2019 tanggal 31 Mei 2019	
101	THR	THR Orang Kayo Hitam	Jambi	UPTD THR Jambi	SK.351/KSDAE/SET/KSA.0/8/2019 tgl 19 Agustus 2019	
102	THR	THR Bukit Sari	Jambi	UPTD THR Jambi	SK.352/KSDAE/SET/KSA.0/8/2019 tgl 19 Agustus 2019	
103	CA	CA Dusun Besar	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.398/KSDAE/SET/KSA.0/10/2019 tanggal 2 Okto 2019	
104	TWA	TWA Danau Dendam TakSudah	Bengkulu	BKSDA Bengkulu Lampung	SK.397/KSDAE/SET/KSA.0/10/2019 tgl 2 Oktober 2019	
105	TWA	TWA Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara	SK.420/KSDAE/SET/KSA.0/10/2019 tgl 16 Oktober 2019	
106	CA	CA Cibanteng	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.482/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2019 tgl 18 Nov 2019	
107	CA	CA Tangkuban Prahu	Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat	SK.490/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2019 tgl 25 Nov 2019	
108	TWA	TWA Danau Buyan Danau Tamblingan (RTK.4)	Bali	BKSDA Bali	SK.484/KSDAE/SET/KSA.0/11/2019 tgl 18 November 2019	
109	TN	TN Manusela	Maluku	BTN Manusela	SK.510/KSDAE/SET/KSA.0/12/2019 tgl 13 Desember 2019	
110	THR	THR Bontobahari	Sulawesi Selatan	Dinas LH Kabupaten Bulukumba	SK.516/KSDAE/SET/KSA.0/12/2019 tgl 17 Desember 2019	



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KAJIAN AWAL EVALUASI KESESUAIAN FUNGSI NASIONAL DENGAN DESK STUDY TAHUN 2019

No	Nama Kawasan Konservasi	Nilai (%)	Status Kesesuaian Fungsi	Rekomendasi
I PROVINSI MALUKU				
1.	CA Bekau Huhun	82,22	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
2.	CA Gunung Api Kisar	83,33	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
3.	CA Pombo	81,48	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
4.	CA Pulau Angwarmase	70,83	Terganggu	- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Cagar Alam
5.	CA Pulau Nustaram	77,08	Terganggu	- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Cagar Alam
6.	CA Pulau Nuswotar	82,22	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
7.	CA Tanjung Sial	66,67	Terganggu	- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Cagar Alam
8.	KSA/KPA Daab	100,00	Utuh	- Segera melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA. - Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
9.	KSA/KPA Danau Tihu	66,67	Terganggu	- Segera melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA. - Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
10.	KSA/KPA Gunung Sahuwai	66,67	Terganggu	- Segera melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi



				sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA.
-	Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			
11.	KSA/KPA Pulau Larat	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Segara melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA.- Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
12.	KSA/KPA Sungai Niff	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Segara melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA.- Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
13.	KSA/KPA Tafermaar	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Segara melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA.- Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
14.	SM Masbait	71,72	Terganggu	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Suaka Margasatwa
15.	SM Pulau Baun	88,51	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
16.	SM Pulau Kasa	79,63	Terganggu	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Suaka Margasatwa
17.	SM Pulau Kobror	89,90	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
18.	SM Pulau Manuk	83,91	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa



19.	SM Tanimbar	89,25	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
20.	TN Manusela	90,20	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
21.	TWA Gunung Api Banda	84,95	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam
22.	TWA Laut Pulau Kasa	94,29	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam
23.	TWA Pulau Marsegu	88,57	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam
24.	TWA Laut Pulau Pombo	85,42	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam
II PROVINSI MALUKU UTARA				
1.	CA Gunung Sibela	91,67	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan.
2.	CA Lifamatola	89,56	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan.
3.	CA Pulau Obi	89,56	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan.
4.	CA Pulau Seho	89,56	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan.
5.	CA Taliabu	91,67	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan.
6.	KSA/KPA Tobalai	83,33	Utuh	- Segara melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA. - Segara melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
7.	TN Aketajawe Lolobata	90,20	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan.
III PROVINSI PAPUA				
1.	CA Biak Utara	64,58	Terganggu	- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Cagar Alam
2.	CA Bupul	80,00	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
3.	CA Enarotali	77,78	Terganggu	- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Cagar Alam
4.	CA Pegunungan Cyclops	79,17	Terganggu	- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Cagar Alam
5.	CA Pegunungan Wayland	81,25	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
6.	CA Pulau Supiori	85,42	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
7.	CA Tanjung Wiay	79,19	Terganggu	- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Cagar Alam
8.	CA Yapen Tengah	80,00	Utuh	- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam



9.	KSA/KPA Mapia	88,89	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Segara melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA.- Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
10.	KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuan Wowi	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Segera melakukan inventarisasi dan identifikasi kekhasan potensi sumberdaya alam hayati flora dan fauna serta ekosistem pada kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPA/KSA.- Segera melakukan penetapan jenis pengelolaan KPA/KSA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
11.	SM Danau Bian	83,81	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
12.	SM Memberamo Foja	86,67	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
13.	SM Pegunungan Jayawijaya	88,57	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
14.	SM Pulau Dolok	87,62	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
15.	SM Pulau Komolon	71,43	Terganggu	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Suaka Margasatwa
16.	SM Pulau Pombo	61,90	Terganggu	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Suaka Margasatwa
17.	SM Savan	65,71	Terganggu	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Suaka Margasatwa
18.	TN Lorentz	90,74	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Taman Nasional
19.	TN Wasur	85,19	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Taman Nasional
20.	TWA Nabire	69,05	Terganggu	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Taman Wisata Alam
21.	TWA Teluk Youtefa	64,29	Terganggu	<ul style="list-style-type: none">- Perlu dilakukan pemulihan ekosistem dan kondisi Taman Wisata Alam
22.	TWA Supiori	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan fungsi kawasan sebagai Taman Nasional
IV	PROVINSI PAPUA BARAT			
1.	CA Pantai Sausafor	85,42	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
2.	CA Pegunungan Arfak	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
3.	CA Pegunungan Fakfak	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
4.	CA Pegunungan Kumawa	87,50	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
5.	CA Pegunungan Tamrau Selatan	91,67	Utuh	<ul style="list-style-type: none">- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam



6.	CA Pegunungan Tamrau Utara	85,42	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
7.	CA Pegunungan Wondiboy	83,33	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
8.	CA Pulau Batanta Barat	87,50	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
9.	CA Pulau Kofiau	85,42	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam - Segara tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
10.	CA Pulau Misool Selatan	83,33	utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
11.	CA Pulau Salawati Utara	84,38	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
12.	CA Teluk Bintuni	81,25	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
13.	CA Wagura Kote	95,83	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
14.	CA Waigeo Barat	89,58	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
15.	CA Waigeo Timur	95,83	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Cagar Alam
16.	SM Mubrani - Kaironi	86,67	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
17.	SM Pulau Sabuda dan P. Tataruga	92,38	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
18.	SM Laut Pulau Venu	90,48	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa - Segara tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
19.	SM Sidei Wibain	84,76	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Suaka Margasatwa
20.	TN Teluk Cenderawasih	84,62	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Taman Nasional
21.	TWA Beriat	84,62	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam
22.	TWA Gunung Meja	87,18	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam
23.	TWA Klamono	92,31	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam
24.	TWA Sorong	89,74	Utuh	- Mempertahankan kondisi dan fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam - Segara tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal



Lampiran 5

JUMLAH PAKET DATA DAN INFORMASI KAWASAN KONSERVASI YANG VALID DAN RELIABLE PADA 521 KSA, KPA DAN TB DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2019

BULAN	CAPAIAN
Januari	Pemutakhiran data potensi 46 kawasan Cagar alam
Februari	Pemutakhiran data potensi 46 kawasan Cagar alam
Maret	Pemutakhiran data potensi 46 kawasan Cagar alam
April	Pemutakhiran data potensi 46 kawasan Cagar alam
Mei	Pemutakhiran data potensi 30 kawasan Cagar alam dan 16 kawasan Suaka Margasatwa
Juni	Pemutakhiran data potensi 46 kawasan Suaka Margasatwa
Juli	Pemutakhiran data potensi 17 kawasan Suaka Margasatwa, 11 kawasan Taman Buru, dan 18 Taman Hutan Raya
Agustus	Pemutakhiran data potensi 15 Taman Hutan Raya dan 31 kawasan Taman Nasional
September	Pemutakhiran data potensi 23 kawasan Taman Nasional dan 23 kawasan Taman Wisata Alam
Oktober	Pemutakhiran data potensi 46 kawasan Taman Wisata Alam
November	Pemutakhiran data potensi 46 kawasan Taman Wisata Alam
Desember	Pemutakhiran data potensi 17 kawasan Taman Wisata Alam dan 29 kawasan KSA/KPA



Lampiran 6

DAFTAR REKAPITULASI USULAN PENETAPAN KPHK NON TAMAN NASIONAL THN 2015

NO	NAMA UPT	NAMA KPHK
1	Balai Besar KSDA Riau	1 Giam Siak Kecil - Bukit Batu (71.500 ha)
		2 Danau Pulau Besar / Danau Bawah (28.237,95 ha)
		3 Bukit Rimbang Bukit Baling (136.000 ha)
2	Balai KSDA Bengkulu	1 Enggano (8.736,57 ha)
		2 Bukit Kaba (13.497,47 Ha)
3	Balai KSDA Jambi	1 Durian Luncuk
		2 Hutan Bakau Pantai Timur
4	Balai KSDA Sumsel	1 Padang Sugihan
5	Balai KSDA Lampung	1 Kepulauan Krakatau
6	Balai KSDA DKI Jakarta	1 Jakarta (232,84 ha)
7	Balai Besar KSDA Jabar	1 Simpang Tilu
		2 Burangrang Tangkuban Parahu
8	Balai KSDA Jawa Tengah	1 Cilacap
		2 Pati Barat
9	Balai Besar KSDA Jatim	1 Kawah Ijen
		2 Dataran Tinggi Yang
10	Balai KSDA Bali	1 Bedugul – Sangeh (3.635,09 Ha)
		2 Kintamani (2.649,27 ha)
11	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	1 Moyo
		2 Gunung Tunak
12	Balai KSDA Kalbar	1 Muara Kendawangan
		2 Gunung Nyiut
13	Balai KSDA Kalimantan Tengah	1 Pararawen (5.855 ha)
		2 Sei Lamandau (76.110 ha)
14	Balai KSDA Kalsel	1 Kuala Lupak
15	Balai KSDA Kaltim	1 Muara Kaman Sedulang
16	Balai KSDA Sulawesi Tengah	1 Gunung Dako PinjanTanjung Matop Dolongan
		2 Pangi Binangga Wera Gunung Sojo Pasoso
		3 Gunung Tinombala Tanjung Santigi
		4. Pamona Bancea Tomata
		5. Morowali Tanjung Api Tokobae
		6. Bakiriang Lombuyan Pati-Pati
17	Balai KSDA Sultra	1 Lambusango
		2 Peropa
18	Balai KSDA Maluku	1 Gunung Sahuwai
		2 Taliabu
19	Balai Besar KSDA Papua Barat	1 Waigeo
		2 Gunung Meja Sidei Kaironi
		3 Arfak
		4 Beriat
		5 Sorong Klamono
20	Balai Besar KSDA Papua	1 Cyclops Youtefa



DAFTAR REKAPITULASI USULAN PENETAPAN KPHK NON TAMAN NASIONAL THN 2016

NO	NAMA UPT	NAMA KPHK	
1	Balai KSDA Aceh	1	Pulau Weh
		2	Lingga Isaq
		3	KPHK Jantho
		4	KPHK Pulau Banyak
2	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	1	Barumun
		2	Sicike cike
		3	Karang Gading Langkat Timur Laut
		4	Sibolangit
		5	Sipirok
		6	Dolok Tinggi Raja
		7	Dolok Surungan
		8	TB Pulau Pini
		9	Holiday Resort
		10	Sijaba Hutaginjang
2	Balai KSDA Sumatera Barat	3	50 Kota
		4	Lembah Anai
3	BKSDA Bengkulu	5	KPHK Seblat
		6	KPHK Pantai Panjang
4	BKSDA Sumatera Selatan	1	KPHK Isau-Isau
		2	KPHK Gumai Pasemah
		3	KPHK Gunung Raya
5	BKSDA Sulawesi Utara	7	Tangkoko
6	BKSDA Yogyakarta	8	Yogyakarta
7	BKSDA Jawa Tengah	1.	KPHK Pewoba
		2.	KPHK Sablokare
8	BBKSDA Jawa Timur	1	Baung - Abang - Trete
		2	Picis-Sigogor-Nglirip-Manggis-Besowo
		3	Bawean-Noko Nusa
		4	Nusa Barong-Watangan-Curah Manis
		5	Pulau Sempu
		6	Pulau Saobi
9	BKSDA Nusa Tenggara Barat	9	Semongkat
		10	Taliwang
		11	Suranadi
		12	Sangiang
		13	Pelangan
10	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1	Harlu
		2	Gunung Mutis
		3	Tuti Adega
		4	Ndeti Kilikima
		5	Wae Wuul
		6	Teluk Maumere
		7	Riung
		8	Kateri



		9	Camplong
		10	Ale Aisio
		11	Watu Ata
		12	Teluk Kupang
11	BKSDA Kalimantan Barat	1.	Kepulauan Karimata
		2	Kelam Komplek
		3	Mandor - Pasi
12	BKSDA Kalimantan Tengah	1	KPHK Tanjung Keluang
13	Balai KSDA Kalimantan Selatan	1.	KPHK Tanah Laut - Gunung
14	BKSDA Sulawesi Tenggara	1	Mangolo
		2	Buton Utara
15	BBKSDA Sulawesi Selatan	1	Mario
		2	Ko'mara
16	BKSDA Maluku	1	KPHK Gunung Api Banda
17	BBKSDA Papua	1	Nabire-Tanjung Wiay

**DAFTAR REKAPITULASI USULAN PENETAPAN KPHK NON TAMAN NASIONAL
TAHUN 2018**

NO	NAMA UPT	NAMA KPHK	
1	BBKSDA Riau	1	TN Zamrud
		2	Muka - Rempang
		3	Buluh Cina
2	BBKSDA Papua	1	Kimaam
		2	Bupul Bian
		3	Membramo Foja
3	BKSDA Sulawesi Utara	1	Karakelang
		2	Lokon Manembo
		3	Panua Tanjung Panjang
		4	Gunung Ambang
4	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	Tahura Bukit Suharto
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	1	Tahura Bunder

**DAFTAR REKAPITULASI USULAN PENETAPAN KPHK NON TAMAN NASIONAL
TAHUN 2019**

NO	NAMA UPT	NAMA KPHK	
1	BKSDA Bengkulu	1	Semaku
		2	Semidang Bukit Kabu
2	Balai Taman Nasional Tambora	1	Taman Nasional Tambora



DAFTAR SK PENETAPAN WILAYAH KPHK YANG TERBIT PADA TAHUN 2016

NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
1	Bolmalit-Maghlit	<u>SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
2	Sorong-Klamono	<u>SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
3	Gunung Meja Sidei Kaironi	<u>SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
4	Arfak	<u>SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
5	Waigeo	<u>SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
6	Morowali	<u>SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulteng
7	Bakiriang	<u>SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulteng
8	Pamona	<u>SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulteng
9	Pangi Binangga	<u>SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulteng
10	Gunung Tinombala	<u>SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulteng
11	Gunung Dako	<u>SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulteng
12	Kuala Lupak	<u>SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Kalsel
13	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	<u>SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Riau
14	Bukit Rimbang Bukit Baling	<u>SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Riau
15	Bukit Kaba	<u>SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Bengkulu
16	Pati Barat	<u>SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Jawa Tengah
17	Cilacap	<u>SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Jawa Tengah
18	Pararawen	<u>SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Kalteng
19	Lamandau	<u>SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Kalteng
20	Bedugul-Sangeh	<u>SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Bali
21	Kintamani	<u>SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Bali
22	Enggano	<u>SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Bengkulu
23	Kawah Ijen	<u>SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jawa Timur
24	Dataran Tinggi Yang	<u>SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jawa Timur
25	Cyclops Youtefa	<u>SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Papua
26	Muara Kaman Sedulang	<u>SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Kal-Tim
27	KPHK Gunung Sahuwai	<u>SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Maluku
28	Taliabu	<u>SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Maluku Utara
29	Jakarta	<u>SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	DKI Jakarta
30	Kepulauan Krakatau	<u>SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Lampung
31	Lambusango	<u>SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sultra
32	Peropa	<u>SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sultra
33	Durian Luncuk	<u>SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jambi
34	KPHK Hutan Bakau Pantai Timur	<u>SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jambi
35	Muara Kendawangan	<u>SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Kalbar
36	Gunung Nyiut	<u>SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Kalbar



NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
37	Simpang Tilu	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Jawa Barat
38	Burangrang Tangkuban Perahu	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Jawa Barat
39	Moyo	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	NTB
40	KPHK Gunung Tunak	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	NTB
41	Padang Sugihan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Sumsel
42	Barumun	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Sumut
43	Sicike Cike	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Sumut
44	Harlu	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	NTT
45	Gunung Mutis	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	NTT
46	Pulau Weh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Aceh
47	Lingga Isaq	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Aceh
48	Tangkoko	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	Sulut
49	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 Sept 2016	DIY

DAFTAR SK PENETAPAN WILAYAH KPHK YANG TERBIT PADA TAHUN 2017

NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
1	Karang Gading dan Langkat Timur Laut	SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
2	Sibolangit	SK.411/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
3	Sipirok	SK.412/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
4	Dolok Tinggi Raja	SK.413/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
5	Dolok Surungan	SK.414/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
6	Holiday Resort	SK.415/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
7	TB Pulau Pini	SK.416/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
8	Sijaba Hutaginjang	SK.417/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Sumut
9	Semongkat	SK.418/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTB
10	Talliwang	SK.419/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTB
11	Suranadi	SK.420/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTB
12	Sangiang	SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTB
13	Tuti Adagae	SK.422/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
14	Ndetra Kilikima	SK.423/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
15	Wae Wuul	SK.424/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
16	Teluk Maumere	SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
17	Riung	SK.426/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
18	Kateri	SK.427/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
19	Camplong	SK.428/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
20	Ale Aisio	SK.429/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
21	Watu Ata	SK.430/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
22	Teluk Kupang	SK.431/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	NTT
23	Nabire Tanjung Wiay	SK.432/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	21 Agust 2017	Papua



DAFTAR SK PENETAPAN WILAYAH KPHK YANG TERBIT PADA TAHUN 2018

NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
1	Jhantoi	SK.123/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Aceh
2	Pulau Banyak	SK.124/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Aceh
3	Lima Puluh Koto	SK.125/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sumatera Barat
4	Seblat	SK.126/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Bengkulu
5	Pantai panjang	SK.127/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Bengkulu
6	Gumai Pasemah	SK.128/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sumatera Selatan
7	Gunung Raya	SK.129/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sumatera Selatan
8	Sablokare	SK.130/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Tengah
9	Nusa Barung - Watangan - Curah Manis	SK.131/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
10	Pulau Sempu	SK.132/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
11	Pulau Saobi	SK.133/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
12	Baung - Abang - Tretes	SK.134/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
13	Picis - Sigogor - Nglirip - Manggis - Besowo	SK.135/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
14	Kepulauan Karimata	SK.136/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Barat
15	Kelam Komplek	SK.137/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Barat
16	Mandor - Pasi	SK.138/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Barat
17	Tanjung Keluang	SK.139/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Tengah
18	Tanah Laut Gunung Kentawan	SK.140/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Selatan
19	Mangolo	SK.141/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Tenggara
20	Buton Utara	SK.142/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Tenggara
21	Mario	SK.143/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Selatan
22	Ko'mara	SK.144/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Selatan
23	Bawean - Noko Nusa	SK.299/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	Jawa Timur
24	Pewoba	SK.301/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	Jawa Tengah
25	Pelangan	SK.302/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	Nusa Tenggara Barat

DAFTAR SK PENETAPAN WILAYAH KPHK YANG TERBIT PADA TAHUN 2019

NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
1	TN Zamrud	SK.2014/ Menlhk/Setjen/Pla.0/3/2019	6 Maret 2019	Riau
2	Tahura Bunder	SK.351/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019	21 Mei 2019	DI Yogyakarta



DAFTAR KPHK YANG BERUBAH BERDASARKAN HASIL REVIEW KPHK

NO	NAMA KPHK	PROVINSI
1	Lima Puluh Koto	Sumatera Barat
2	Arau Hilir	Sumatera Barat
3	TN Siberut	Sumatera Barat
4	Kerumutan	Riau
5	Bukit Rimbang Bukit Baling	Riau
6	TN Zamrud	Riau
7	TN Bukit Tigapuluh	Riau dan Jambi
8	Hutan Bakau Pantai Timur	Jambi
9	TN Berbak	Jambi
10	Padang Sugihan	Sumatera Selatan
11	Pantai Panjang	Bengkulu
12	TN Sembilang	Sumatera Selatan
13	TN Gunung Halimun Salak	Jawa Barat
14	TN Gunung Ciremai	Jawa Barat
15	Cilacap	Jawa tengah
16	Sablokare	Jawa tengah
17	Pewoba	Jawa tengah
18	TN Gunung Merbabu	Jawa tengah
19	Kawah Ijen	Jawa Timur
20	Dataran Tinggi Yang	Jawa Timur
21	Nusa Barung - Watangan - Curah Manis	Jawa Timur
22	Baung - Abang -Tretes	Jawa Timur
23	Picis - Sigogor - Nglirip - Manggis - Besowo	Jawa Timur
24	Tanjung Keluang	Kalteng
25	TN Tanjung Puting	Kalteng
26	TN Sebangau	Kalteng
27	Muara Kaman Sedulang	Kaltim
28	TN Kutai	Kaltim
29	Tanah Laut Gunung Kentawan	Kalsel
30	Gunung Sahuwai	Maluku
31	TN Manusela	Maluku Tengah
32	Bolmalit - Maghlit	Papua Barat
33	Sorong - Klamono	Papua Barat
34	Gunung Meja Sidei Kaironi	Papua Barat
35	Arfak	Papua Barat
36	Waigeo	Papua Barat

**DATA PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2019**

A. PERJANJIAN KERJASAMA PENGUATAN FUNGSI TAHUN 2019 (38 PKS)

No	Pemohon	UPT/Instansi	Judul Kerja Sama	Penandatangan PKS	Jangka Waktu	Keterangan
1	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Balai TN Bali Barat	Kerja sama Penguatan Fungsi kawasan TN Bali Barat berupa Perlindungan Kawasan dan Keanekaragaman Hayati dalam rangka Pemanfaatan Zona Religi, Budaya, Sejarah untuk mendukung ritual keagamaan Umat Hindu di Kabupaten Buleleng	PKS.100/T.16/TU/Kons/2019 dan 075/7/PKS/PEM/2019 tanggal 16 Januari 2019	5 Tahun (16 Januari 2019-16 Januari 2024)	Areal kegiatan seluas 42,02 Ha
2	Yayasan Owa Jawa	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	Pelestarian Owa Jawa	PKS.190/BBTNGGP/BTU/KS/02/2019 dan 10/YOJ-PKS/II/2019 tanggal 6 Februari 2019	5 Tahun (6 Februari 2019 - 6 Februari 2024)	Areal kegiatan berada di wilayah kerja Resort PTN Bodogol Seksi Wilayah V Bodogol, seluas ± 2.00 Ha
3	Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan "Maju Bersama" Desa PAL VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong (KPPL Maju Bersama)	Balai Besar TN Kerinci Seblat	Kemitraan Konservasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Berupa Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kecombrang (<i>etlingera elatior</i>) dan Pakis (<i>diploazium esculentum</i>) di Zona Tradisional Kawasan Hutan Madapi TN Kerinci Seblat	PKS. 175/T.1/BTU/REN/3/2019 dan 01/KPPL/PKS/PALVIII/2019 tanggal 5 Maret 2019	5 Tahun (5 Maret 2019 - 5 Maret 2024)	Areal kegiatan berada di kawasan hutan Madapi TN Kerinci Seblat SPTN Wilayah VI, Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Bengkulu, seluas ±10 Ha di zona tradisional
4	Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau	Balai Besar KSDA Riau		PKS di tandatangani tanggal 13 Maret 2019	5 Tahun (13 Maret 2019 - 13 Maret 2024)	Nomor PKS belum ada
5	Yayasan Arsari Djojohadikusumo	Balai KSDA Kalimantan Timur	Penguatan Fungsi dalam rangka Konservasi Orangutan dan Satwa Liar lainnya serta habitatnya di wilayah kerja Balai KSDA Kalimantan Timur	PKS.062/K.18/TU/PROG/I/2019 dan 049/YAD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019	5 Tahun (15 Maret 2019 - 15 Maret 2024)	Areal kerjasama berada di dalam Hak Guna Bangunan (HGU) milik PT ITCI Kartika Utama yang telah diserahkan



					pengelolaannya kepada pihak kedua seluas ±11 Ha.	
6	Kepala Desa Tuare, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah	Balai Besar TN Lore Lindu	Kemitraan Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat di Zona Tradisional Taman Nasional Lore Lindu	PKS.290/IV-T-5/TU-PKS/03/2019 dan 15/145/DT/2019 tanggal 14 Maret 2019	5 Tahun (14 Maret 2019 - 14 Maret 2024)	Areal kerjasama berada pada zona tradisional TN Lore Lindu, Desa Tuare, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, yang masuk ke dalam wilayah kerja Resort Tuare, SPTN Wilayah V Lengkeka, Bidang Pengelolaan Wilayah III Poso seluas 50 Ha.
7	Kepala Desa Lelio, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah	Balai Besar TN Lore Lindu	Kemitraan Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat di Zona Tradisional Taman Nasional Lore Lindu	PKS.292/IV-T-5/TU-PKS/03/2019 dan 07/141/DL/III/2019 tanggal 14 Maret 2019	5 Tahun (14 Maret 2019 - 14 Maret 2024)	Areal kerjasama berada pada zona tradisional TN Lore Lindu, Desa Lelio, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, yang masuk ke dalam wilayah kerja Resort Lelio, SPTN Wilayah V Lengkeka, Bidang Pengelolaan Wilayah III Poso seluas 50 Ha.
8	Kepala Desa Lengkeka, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah	Balai Besar TN Lore Lindu	Kemitraan Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat di Zona Tradisional Taman Nasional Lore Lindu	PKS.288/IV-T-5/TU-PKS/03/2019 dan 15/140/DL/2019 tanggal 14 Maret 2019	5 Tahun (14 Maret 2019 - 14 Maret 2024)	Areal kerjasama berada pada zona tradisional TN Lore Lindu, Desa Lengkeka, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, yang masuk ke dalam wilayah kerja Resort Tuare, SPTN Wilayah V Lengkeka, Bidang Pengelolaan Wilayah III Poso seluas 50 Ha.



9	Kepala Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah	Balai Besar TN Lore Lindu	Kemitraan Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat di Zona Tradisional Taman Nasional Lore Lindu	PKS.289/IV-T-5/TU-PKS/03/2019 dan 10/140/DK/2019 tanggal 14 Maret 2019	5 Tahun (14 Maret 2019 - 14 Maret 2024)	Areal kerjasama berada pada zona tradisional TN Lore Lindu, Desa Kolori Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, yang masuk ke dalam wilayah kerja Resort Lelio, SPTN Wilayah V Lengkeka, Bidang Pengelolaan Wilayah III Poso seluas 50 Ha.
10	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	Balai TN Wakatobi	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Kantor Bupati dan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara	PKS.612/T.21/TU/REN/4/2019 dan 522.51/PKS/8/PEMKAB/IV/2019 tanggal 22 April 2019	5 Tahun (22 April 2019 - 22 April 2024)	Areal kerjasama berada pada zona khusus daratan TN Wakatobi wilayah Resort Matahora, SPTN Wilaayah I, seluas ± 41,72 Ha
11	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia , Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba)	Balai KSDA Bali	Penguatan Fungsi Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dan Taman Wisata Alam Panelokan melalui Pemanfaatan dan Pengembangan Museum Gunungapi dan Pusat Pelatihan Geominerba Batur	PKS.12/BKSDA.BL-1/KK/5/2019 dan 352.Pj/05.01/BPG/2019 tanggal 2 Mei 2019	5 Tahun (2 Mei 2019 - 2 Mei 2024)	Areal kerjasama berada di TWA Panelokan seluas 574,27 Ha dan TWA Gunung Batur Bukit Payang seluas 2.075 Ha
12	Kelompok Masyarakat KUB Windu Jaya	Balai TN Alas Purwo	Penguatan Fungsi tentang Optimalisasi Pengelolaan Zona Tradisional Perairan Segoro Anak TN Alas Purwo secara Lestari Melalui Pendekatan Kolaboratif	PKS. 003/T.38/TU-3/KUM.3/5/2019 dan 008/03/KNWJ/05/2019 tanggal 27 Mei 2019	5 Tahun (27 Mei 2019-27 Mei 2024)	Areal Kerjasama berada di Segoro Anak SPTN Wilayah I Tegaldimo, seluas 463,70 Ha
13	Kelompok Masyarakat Baruna Jaya	Balai TN Alas Purwo	Penguatan Fungsi tentang Optimalisasi Pengelolaan Zona Tradisional Perairan Segoro Anak TN Alas Purwo secara Lestari Melalui Pendekatan Kolaboratif	PKS. 004/T.38/TU-3/KUM.3/5/2019 dan 001/03/KUBBJ/SA/05/2019 tanggal 27 Mei 2019	5 Tahun (27 Mei 2019-27 Mei 2024)	Areal Kerjasama berada di zona tradisional perairan segoro anak, Resot Grajagan, seluas 400,90 Ha
14	Kelompok Nelayan Timbul Harapan Baru	Balai TN Berbak dan Sembilang	Kemitraan Konservasi melalui Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Terbatas untuk Jenis Udang yang tidak dilindungi pada Zona Tradisional TN	PKS.167/T.10/TU/KSA/4/2019 dan 01/THB/4/2019 tanggal 1 April 2019	5 Tahun (1 April 2019 - 1 April 2024)	Areal kerjasama berada di Resort Ngirawan, TN Sembilang seluas 4,900.65 Ha



Sembilang						
15	Kelompok Nelayan Sumber Nelayan	Balai TN Berbak dan Sembilang	Kemitraan Konservasi melalui Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Terbatas untuk Jenis Udang Petak tidak dilindungi pada Zona Tradisional TN Sembilang	PKS.168/T.10/TU/KSA/4/2019 dan 01/SN/4/2019 tanggal 1 April 2019	5 Tahun (1 April 2019 - 1 April 2024)	Areal kerjasama berada di Resort Ngirawan, TN Sembilang seluas 4,900,65 Ha
16	Kelompok Nelayan Jaya Bersama	Balai TN Berbak dan Sembilang	Kemitraan Konservasi melalui Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Terbatas untuk Jenis Ikan yang tidak dilindungi pada Zona Tradisional TN Sembilang	PKS.169/T.10/TU/KSA/4/2019 dan 01/NJB/4/2019 tanggal 1 April 2019	5 Tahun (1 April 2019 - 1 April 2024)	Areal kerjasama berada di Resort Ngirawan, TN Sembilang seluas 4,900,65 Ha
17	Kelompok Nelayan Berkat Nelayan	Balai TN Berbak dan Sembilang	Kemitraan Konservasi melalui Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Terbatas untuk Jenis Tambak Kerang pada Zona Tradisional TN Sembilang	PKS.170/T.10/TU/KSA/4/2019 dan 01/BN/4/2019 tanggal 1 April 2019	5 Tahun (1 April 2019 - 1 April 2024)	Areal kerjasama berada di Resort Ngirawan, TN Sembilang seluas 85,70 Ha
18	Kelompok Nelayan Sumber Rezeki	Balai TN Berbak dan Sembilang	Kemitraan Konservasi melalui Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Terbatas untuk Jenis Udang Petak tidak dilindungi pada Zona Tradisional TN Sembilang	PKS.171/T.10/TU/KSA/4/2019 dan 01/SR/4/2019 tanggal 1 April 2019	5 Tahun (1 April 2019 - 1 April 2024)	Areal kerjasama berada di Resort Sembilang, TN Sembilang seluas 3,501,91 Ha
19	Kelompok Nelayan Putra Pantai	Balai TN Berbak dan Sembilang	Kemitraan Konservasi melalui Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Terbatas untuk Jenis Kerang tidak dilindungi pada Zona Tradisional TN Sembilang	PKS.172/T.10/TU/KSA/4/2019 dan 01/PP/4/2019 tanggal 1 April 2019	5 Tahun (1 April 2019 - 1 April 2024)	Areal kerjasama berada di Resort Sembilang, TN Sembilang seluas 3,501,91 Ha
20	Kelompok Nelayan Usaha Nelayan	Balai TN Berbak dan Sembilang	Kemitraan Konservasi melalui Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Sumber Daya Perairan Terbatas untuk Jenis Ikan tidak dilindungi pada Zona Tradisional TN Sembilang	PKS.173/T.10/TU/KSA/4/2019 dan 01/NUN/4/2019 tanggal 1 April 2019	5 Tahun (1 April 2019 - 1 April 2024)	Areal kerjasama berada di Resort Sembilang, TN Sembilang seluas 3,501,91 Ha
21	Forum Konservasi Orangutan Kalimantan Barat (FOKKAB)	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Penguatan Fungsi dalam rangka Survey/Monitoring Orangutan pada Sub Das Embaloh di Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi	PKS.405/T.4/TU/PKS/6/2019 dan 11/Fokkab/Ek/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019	5 Tahun (11 Juni 2019 - 11 Juni 2024)	Areal Kerjasama berada pada wilayah Sub Das Embaloh dalam kawasan TN Betung Kerihun seluas 216.838,97



Kaltimantan Barat						
Ha						
22	The Babacootevillage Inc <i>(Safari On Jeju)</i>	Balai KSDA Jakarta	Dukungan Perlindungan Pengawetan Keanekaragaman Hayati di Suaka Margasatwa Pulau Rambu dan Penguatan Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur	PKS.1004/K.13/TU/Prog/6/2019 dan CA-001/BKSDA-FSJ/6/2019 tanggal 24 Juni 2019	5 Tahun (24 Juni 2019 - 24 Juni 2024)	Areal Kerjasama berada di SM Pulau Rambut dan PPS Tegal Alur
23	Direktur Utama PT. Candi Ngrimbi	Balai Besar KSDA Jawa Timur	Pengendalian Gas Sulfatara dan Pemanfaatan Belerang dengan Cara Sublimasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Blok Pemanfaatan TWA Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur	PKS.822/K.2/TU.2/KSA/7/2019 dan 031/CN/VII/2019 11 Juli 2019	5 Tahun (11 Juli 2019 - 11 Juli 2024)	Areal Kerjasama berada di pemanfaatan TWA Kawah Ijen, seluas ± 2,499 Ha
24	Rektor Universitas Udayana	Balai KSDA Bali	Penguatan Fungsi Berupa Dukungan Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan Pendekatan Ilmiah (<i>Scientific Based</i>)	PKS. 9/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2019 dan 71/UN14/KS/2019 tanggal 10 Oktober 2019	5 Tahun (10 Oktober 2019-10 Oktober 2024)	Nota Kesepahaman
25	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana	Balai KSDA Bali	Penguatan Fungsi Berupa Dukungan Penyelenggaraan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Danau Buyan-Danau Tamblingan, Provinsi Bali, Melalui Pendekatan Ilmiah (<i>Scientific Based</i>)	PKS.19/BKSDA.BL-1/KK/10/2019 dan 5388/UN14.2.8/KS/2019 tanggal 10 Oktober 2019	5 Tahun (10 Oktober 2019-10 Oktober 2024)	Areal Kerjasama berada blok perlindungan CA Batukau seluas ±1.768,194 Ha, serta ruang publik pada pemanfaatan dan blok perlindungan di TWA Danau Buyan Danau Tamblingan seluas ±1.006,588 Ha, dengan total luas ±2.774,782 Ha
26	Ketua Umum Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI)	---	Penguatan Fungsi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Bentuk Penyelamatan Satwa Primata	PKS.11/KSDAE/SET/KUM.3/11/2019 dan 002/NK/YIARI-BGR/XI/2019 tanggal 19 November 2019	5 Tahun (19 November 2019-19 November 2024)	
27	Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam	Balai TN Bali Barat	Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat melalui Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Pengabdian Masyarakat berbasis Pendekatan ilmiah (<i>Scientific Based</i>)	PKS. 2215/T.16/TU/Kons/11/2019 dan 6743/UN14.2.8/KS/2019 tanggal 28 November 2019	5 Tahun (28 November 2019-28 November 2024)	
28	Fakultas Kedokteran Hewan	Balai TN Bali Barat	Judul kerja sama menyusul	tanggal 28 November 2019	5 Tahun (28 November 2019-28 November 2024)	



29	Fakultas Kelautan dan Perikanan	Balai TN Bali Barat	Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat melalui Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Pengabdian Masyarakat berbasis Pendekatan ilmiah (<i>Scientific Based</i>)	PKS. 2220/T.16/TU/Kons/11/2019 dan 1604/UN14.2.13/HK.07.00/2019 tanggal 28 November 2019	5 Tahun (29 November 2019-29 November 2024)
30	Pascasarjana	Balai TN Bali Barat	Penguatan Fungsi Taman Nasional Bali Barat melalui Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Pengabdian Masyarakat berbasis Pendekatan ilmiah (<i>Scientific Based</i>)	PKS. 2217/T.16/TU/Kons/11/2019 dan 603/UN14.3/KS/2019 tanggal 28 November 2019	5 Tahun (28 November 2019-28 November 2024)
31	Perwakilan Bank BI DKI Jakarta	Balai TN Kepulauan Seribu	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Kepulauan Seribu	PKS. 1198/T.13/TU/PKS/11/2019 dan 21/16/PKS/JKT/2019 tanggal 15 November 2019	5 Tahun (15 November 2019-15 November 2024)
32	Yayasan Bhakti Mangkol	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Tengah	Penguatan Fungsi dalam rangka Pemulihan Ekosistem dengan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	522/341/PKS/DLH/2019 tanggal 9 Desember 2019	5 Tahun (9 Desember 2019-9 Desember 2024)
33	Pastor Paroki St. Bernadeth	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Tengah	Penguatan Fungsi dalam rangka Pemulihan Ekosistem dengan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	522/340/PKS/DLH/2019 tanggal 9 Desember 2019	5 Tahun (9 Desember 2019-9 Desember 2024)
34	Kelompok Tani Pratama	Balai Besar TN Gunung Leuser	Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser melalui Dukungan Kemitraan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Desember 2019	5 Tahun (Desember 2019-Desember 2024)
35	PT. Adhiniaga Kreasinusa	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	Kerja Sama Penguatan Fungsi dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Dan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan (CAL-BBS) Kabupaten Tanggamus Dan Pesisir Barat Provinsi Lampung	PKS. 75/T.7/TU/PKS.2/12/2019 PKS. 2231/K.IV/TU/PKS/12/2019 05/PKS-AKN-JKT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019	5 Tahun (13 Desember 2019-13 Desember 2024)
36	Yayasan Masarang	Balai KSDA	Penyelamatan dan Perlindungan serta	Desember 2019	---



Sulawesi Utara		Rehabilitasi Satwa Liar Dilindungi di Sulawesi Utara		
37	Gubernur Bengkulu	Balai KSDA Bengkulu	Penguatan Fungsi Taman Wisata Danau Dendam Tak Sudah Reg.61 melalui Perlindungan Kawasan, Pengembangan Wisata Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bengkulu	23 Desember 2019
38	Ketua Yayasan Biosfir	Balai TN Bali Barat	Kerja sama Penguatan Fungsi dalam rangka Taman Nasional Bali Barat berupa pemulihian ekosistem dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia melalui Edukasi Konservasi	PKS. 2337/T.16/TU/Kons/12/2019 dan 01/PKS/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019

B. Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan (40 PKS)

No.	Provinsi	UPT	Kawasan Konservasi	Mitra Kerja Sama	Persetujuan Kerja Sama	PKS	Perihal	Kategori
1	Bangka Belitung	Dinas LH Kab. Bangka Tengah	TAHURA Gunung Mangkol	Manager PT Indosat Tbk	S.337/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2017 tgl 10 Juli 2017	No.522/181/PKS/DLH/2017 dan No.441/D00-D01F/LGL/17 Tgl 24 Juli 2017	Keberadaan Menara BTS PT Indosat di Tahura Gunung Mangkol, Kab Bangka Tengah, Babel	Komunikasi
2	Sulawesi Selatan	BTN Bantimurung Bulusaraung	TN Bantimurung Bulusaraung	PT. PLN (Persero) UP2K Sulawesi Selatan	S.54/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2018 tgl 5 Feb 2018	No.PKS.01/T.46/TU/KUM.3 /2/2018 dan No.0056.Pj/REN.06.02/WS STG/2018 Tgl 22Feb 2018	Jaringan listrik SUTM 20 kV untuk desa-desa yang berada di Zona Khusus TN Bantimurung Bulusaraung	Jaringan Listrik
3	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	TWA Bukit Kaba	Bupati Kepahiang	S.172/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2018 tgl 23 Maret 2018	No.NK.872/K.10/TU/PKS/04/2018 dan No.800/335/KPH/2018 tgl 23 April 2018	Permohonan Kerjasama Pegelolaan TWA Bukit Kaba dlm rangka pembangunan ruas jalan Bandung Jaya - Kepahiang Indah/Renah Kurung, Renah Kurung - Bandung Bandung, Renah Kurung - Air Punggur sepanjang ±9,6 Km lebar 10 meter	Transportasi Terbatas



4	Kalimantan Timur	UPTD TAHURA Bukit Soeharto	TAHURA Bukit Soeharto	Direktur Karya Putra Borneo	S.577/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2018 tgl 17 Sept 2018	No.073/384/TBS-II/2018 dan No.KPB/MGT-DIR/2018/XII/100 Tgl 17 Des 2018	Perpanjangan PKS Pemanfaatan Jalan Eks. HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang 5,3 Km dan penambahan baru 2 Km	Transportasi Terbatas
5	Kalimantan Timur	UPTD TAHURA Bukit Soeharto	TAHURA Bukit Soeharto	Direktris PT Lembu Swana Perkasa	S.631/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2018 tgl. 11 Okt 2018	No.073/392/TBS-II/2018 dan No.012/LSP-ADM/XII/2018 Tgl 20 Des 2018	Perpanjangan PKS Pemanfaatan Jalan Eks. HPH di Tahura Bukit Soeharto sepanjang 8,5 Km	Transportasi Terbatas
6	Sulawesi Tenggara	BKSDA SULTRA	TWA Teluk Lasolo	General Manage (SVP) Southeast Sulawesi Nickel Mining Business Unit, PT ANTAM Tbk.	S.784/KSDAE/PIKA/OTL.0/12/2018 Tgl 31 Des 2018	No.PKS.28/K.25/TU-1/12/2018 dan No.PKS.032a/UN/0505/2018 Tgl 31 Des 2018	Kerjasama Pemanfaatan Alur Perairan di TWA Lasolo a.n. PT ANTAM	Transportasi Terbatas
7	Sulawesi Tenggara	BKSDA SULTRA	TWA Teluk Lasolo	Direktur Utama PT Cinta Jaya	S.769/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2018 Tgl 31 Des 2018	No.PKS.30/K.25/TU-1/12/2018 dan No.PKS.115/PT.CJ-Mks/XII/2018 Tgl 31 Des 2018	Kerjasama Pemanfaatan dan Pengembangan Transportasi Terbatas di TWA Lasolo	Transportasi Terbatas
8	Sulawesi Tenggara	BKSDA SULTRA	TWA Teluk Lasolo	Dirut PT Bhumi Karya Utama	S.782/KSDAE/PIKA/OTL.0/12/2018 Tgl 31 Des 2018	No.PKS.29/K.25/TU-1/12/2018 dan No.PKS.001/EXT-BKU/PKS/XII/2018 Tgl 31 Des 2018	Kerjasama Pemanfaatan Alur Perairan di TWA Lasolo a.n. PT Bhumi Karya Utama sepanjang ±35,98 Km	Transportasi Terbatas
9	Sulawesi Tenggara	BTN Rawa Aopa Watumohai	TN Rawa Aopa Watumohai	Direktur PT PLN (Persero)	S.266/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2018 tgl 2 Mei 2018	No.PKS.01/T.22/TU/PKS.1/2019 dan No.0003.MoU/KON.00.03/U IPSULBAGSEL/2019 Tgl Januari 2019	Kerjasama Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Kendari-Andolo-Kaseputre di Zona Khusus Lanowolu - Langkowala seluas 44,54 Ha di TN Rawa Aopa Watumohai	Jaringan Listrik
10	Sulawesi Tenggara	BKSDA SULTRA	TWA Teluk Lasolo	Direktur PT Bumi Konawe Minerina	No.S.658/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2018 Tgl 25 Okt 2018	No.PKS.26/K.25/TU-1/10/2018 dan No.001/SPK/BKM/XI/2018 Tgl Okt 2018	Pemanfaatan Alur Perairan TWA Teluk Lasolo (Blok Khusus) di Desa Tampunngaya Kec. Molawe, Kab. Konsel sepanjang 39,11 Km	Transportasi Terbatas



11	Sumatera Barat	BKSDA SUMBAR	KSA/KPA Malampah Alahan Panjang dan Batang Pangean I	GM PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Utara	S.113/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2019 Tgl 6 Feb 2019	No.PKS.001/K.9/TU/KSA/2019 dan No.0001/MOU/HKM.0001/UP.SUMBAGUT/2018 Tgl 14 Feb 2019 'No.PKS.002/K.9/TU/KSA/2019 dan No.0002/MOU/HKM.0001/UP.SUMBAGUT/2018 Tgl 14 Feb 2019	Perpanjangan PKS di KSA/KPA Malampah Alahan Panjang dan Batang Pangean I Sumbar	Jaringan Listrik
12	Sulawesi Tengah	BKSDA SULTENG	SM Bakiriang	Direktur PT PLN (Persero)	S.135/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2019 tgl 12 Feb 2019	No.PKS.116/IV.K-22/P2KS/2/2019 dan No.0298/KON.00.03/UIPSULBAGUT/2019 Tgl 20 Feb 2019	Kerjasama Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV GI Luwuk - PLTMG Luwuk - GI Toili (PSN) sebanyak 7 titik tower di SM Bakiriang	Jaringan Listrik
13	Bali	BKSDA Bali	TWA Danau Buyan dan Danau Tamblingan	Kepala BPJN VIII	S.116/KSDAE/PIKA/KSA.0/2/2019 Tgl 11 Feb 2019	No.01/BKSDA.BL-1/KK/2019 dan No.HK.02.01-Bb8/280 tgl 27 Feb 2019	Kerjasama Pemanfaatan Lahan TWA Danau Buyan dan Danau Tamblingan untuk Pembangunan Jalan Baru BTS. Kota Singaraja - Mengwitani (MYC) (Shortcut 4) seluas 11.555,93 m ³	Transportasi Terbatas
14	Kalimantan Barat	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Danau Sentarum	GM ICT Operation Region Kalimantan PT Telkomsel	S.9/KSDAE/PIKA/OTL.0/1/2019 Tgl 8 Jan 2019	No.PKS.219/T.4/TU/PKS/3/2019 dn No.PKS.122/LG.05/AR.004/III/2019 Tgl 12 Maret 2019	Kerjasama Keberadaan BTS Telkomsel di Desa Vega Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu di TN Danau Sentarum	Komunikasi
15	Kalimantan Timur	BTN Kutai	TN Kutai	GM ICT Opeartion Region Kalimantan PT Telkomsel	S.12/KSDAE/PIKA/OTL.0/1/2019 Tgl 8 Jan 2019	Nomor : PKS.180/T.44/TU/Ren/3/2019 dan Nomor : PKS.123/LG.05/AR.004/III/2019 tgl 12 Maret 2019	Pengoperasian BTS PT Telkomsel di TN Kutai	Komunikasi



16	Bengkulu	BKSDA Bengkulu	CA dan CAL Kep. Krakatau	Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Plh. Deputi Kepala BPPT Bidang TPSA, Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral	S.192/KSDAE/PIKA/K SA.0/3/2019 tanggal 13 Maret 2019	No.PKS.487/K.10/TU/PKS/03/2019 dan No.23a/PKS/BPPT-KLHK/03/2019 tgl 15 Maret 2019	Kerjasama Pembangunan Cable-Based Tsunameter (CBT) Sistem Deteksi Dini Ancaman Tsunami Selat Sunda di CA dan CAL Kep. Krakatau, berupa: a. Stasiun Pantai di P. Sertung 5x5 m b. Jalur Kabel Optik dari sensor ke BMH sepanjang ±3 KM	Mitigasi Bencana
17	Papua	BTN Lorentz	TN Lorentz	Direktur Utama PT Palapa Timur Telematika	S.583/KSDAE/PIKA/K SA.0/9/2018 tgl 24 Sept 2018	No.PKS.49/BTNL/TU/Um/3/2019 dan No.2101/PTT/PD-DIR/III/2019 Tgl 21-3-2019	Kerjasama Pembangunan Strategis Proyek Palapa Ring Timur di TN Lorentz 6 Tower	Komunikasi
18	Banten	BTN Gunung Halimun Salak	TN Gunung Halimun Salak	Bupati Lebak	S.181/KSDAE/PIKA/O TL.0/3/2019 tgl 8 Maret 2019	No.PKS.446/T.14/TU/KUM/4/2019 dan No.102/MoU-5a/Kerda/2019 Tgl 4 April 2019 Tgl. 4 April 2019	Peningkatan Jalan Penghubung Daerah Terisolir ruas Jalan Cikumpay-Cigobang (Batas Bogor) di TNGHS sepanjang 9,3 Km lebar 12 m (25,8 Ha)	Transportasi Terbatas
19	Jambi	Dinas LH Kab. Batang Hari	TAHURA Sultan Thaha Syaifuddin	GM TAC Pertamina EP - Prakarsa Betung Meruo Senami Jambi	S.160/KSDAE/PIKA/K SA.0/2/2019 Tgl 22 Feb 2019	No.660.1/03/THR-STS/DLH/2018 dan No.001/GA-PBMSJ/VI/2018 tgl 6 Juni 2018 Jo. No.660.1/184/THR-STS/DLH/2019 dan No.002/GA-PBMSJ/IV/2019 tgl 10 April 2019 (5 th)	Perpanjangan Kerjasama dg PT PBMSJ ttg Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifuddin Jambi seluas 64 ha	Migas



20	Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	TN Wakatobi	Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab Wakatobi	S.691/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2018 Tgl 22 Nov 2018	No.PKS.612/T.21/TU/REN/4/2019 dan No.522.51/PKS/8/PEMKAB /IV/2019 Tgl 22 April 2019	Rencana Pembangunan Kantor Bupati Perkantoran Pemda, Pendalaman Alur Masuk dan Area Dermaga Waitii, Pendalaman Alur Masuk Pelabuhan Tomia, Pelabuhan Penyeberangan Veri Kaledupa, Tomia, Binongko dan Numana di TN Wakatobi	Transportasi Terbatas
21	Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	TN Wakatobi	Plt. Kepala Bappeda Kab. Wakatobi	S.456/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2018 tgl 6 Ags 2018	No.PKS.613/T.21/TU/REN/4/2019 dan No.522.52/PKS/9/PEMKAB /IV/2019 Tgl 22 April 2019	Pembangunan Jembatan Numana (P.Wangi-wangi) - Kapota (P. Kapota) panjang 3.183 m lebar 10-12 m di Zona Pemanfaatan Lokal TN Wakatobi	Transportasi Terbatas
22	Sulawesi Tengah	BKSDA SULTENG	CA Pangi Binanga	Menteri PUPR	S.736/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2018 Tgl 6 Des 2018	No.PKS.349/BKSDAST/TU/P2KS/2019 dan No.01/PKS/Bb14/2019 Tgl Mei 2019	Peningkatan Jalan Nasional yang melintasi Blok Khusus CA Pangi Binanga sepanjang 2.052,87 m atau 2,05 Km (2,67 ha), Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulteng	Transportasi Terbatas
23	Jawa Timur	BTN Meru Betiri	TN Meru Betiri	Kepala Devisi Operasi Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kantor Pusat PT PLN (Persero)	S.590/KSDAE/PIKA/KSA.0/9/2018 tgl 24 Sept 2018	No.PKS.360/T.15/TU/KSK/05/2019 No.0006.MOU/KON.03.01/DIST-JATIM/2019 Tgl. 24 Mei 2019	Pembangunan Jaringan Listrik 20 kV di TN Meru Betiri (LISDES Dsn. Sukamande, Ds. Sarongan, Kec. Pesanggrahan, Kab. Banyuwangi sepanjang 5 Kms.)	Jaringan Listrik
24	Jawa Timur	BBKSDA JATIM	CA Pulau Nusa Barung	Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya	S.83/KSDAE/PIKA/KSA.0/1/2019 Tgl 30 Jan 2019	PKS.777/K.2/TU.2/KSA/6/2019 dan No.HK.107/05/18/DNG.SB Y-19 tanggal 25 Juni 2019	Perpanjangan Kerja Sama Pengoperasian dan Pemeliharaan Menara Suar di CA Pulau Nusa Barung, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur	Transportasi Terbatas
25	Aceh	Dinas LHK Kota Subulussalam	TAHURA Subulussalam	General Manager PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Utara	S.334/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 Tgl 7 Mei 2019	No.PKS.001/DLHK.SS/THR/V/2019 dan No. 005/MOU/HKM.00.01/UIP SUMBAGUT/2019 Tgl 27 Mei 2019	Kerjasama Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Sidikalang - Subulussalam di Tahura Subulussalam	Jaringan Listrik



26	Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Gede Pangrango	GM ICT Operation Region Jabodetabek, PT Telekomunikasi Seluler	S.328/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 tanggal 3 Mei 2019	PKS.652/BBTNGGP/TU/KS /5/2019 dan Nomor: 0842/LG.05/RC-03/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Penempatan Base Transceiver Station (BTS) Mobile (combat) Telkomsel di wilayah Situgunung Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kab. Sukabumi di TNGGP: a. koordinat pemasangan BTS Combat, - 6.8321 ; 106.9279 b. ukuran lahan/areal pemasangan BTS 9 m x 8 m (72 m ²);	Komunikasi
27	Kalimantan Selatan	BKSDA KALSEL	SM Kuala Lupak	Kepala Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin	S.739/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2018 Tgl 17 Des 2018	No.PKS.4256/BKSDA.KAL SEL-1.5/2019 dan No.UM.003/3/13/DNG.BJM-19 Tgl 19 Juni 2019	Kerjasama Menara Suar di SM Kuala Lupak, dengan luas 0,484 ha Kalsel	Transportasi Terbatas
28	Kalimantan Timur	BTN Kutai	TN Kutai	Plh. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur, Manager Hukum Komunikasi Pertanahan	S.200/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2019 Tgl. 14 Maret 2019	No.PKS.370/T.44/TU/Ren/6 /2019 - No.003.Pj/HKM.00.01/UIP KALBAGTIM/2019 Tgl 20 Juni 2019	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Jaringan SUTT 150kV Bontang Sangatta di TN Kutai	Jaringan Listrik
29	Sulawesi Utara	BKSDA SULUT	CA Panua	Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN (Persero)	S.330/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2018 tgl 23 Mei 2018	No.PKS.351/BKSDA.SULTU/TU/7/2019 dan No.0018.PJ/KON.00.03/UIP SULBAGUT/2019 Tgl 18 Juli 2019	Kerjasama Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Jalur Marisa-Moutong-Kotaraya di CA Panua Prov. Gorontalo (4 segmen dan 2 tower intersection point)	Jaringan Listrik



30	Nusa Tenggara Barat	BTN Gunung Rinjani	TN Gunung Rinjani	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	S.542/KSDAE/PIKA/KSA.0/7/2019 Tgl 18 Juli 2019	No. PKS.01/T.39/TU/KUM.3/7/2019 dan No.HK.02.03/BPJN.IX/676/2019 Tgl 22 Juli 2019	Peningkatan Jalan Nasional Ruas Jalan Bayan-Sembalun Bumbung, KH Sajang-Bawak Nao ($p=2,115$ km $l=24$ m $5,064$ ha di Z. Khusus) dan Taman Bunga-Sebau ($p=6,299$ km $l=24$ m $9,030$ ha Z.Khusus & Pemanfaatan), TN Gunung Rinjani (TNGR) seluas $14,094$ ha lebar dari 6 m menjadi 24 m	Transportasi Terbatas
31	Nusa Tenggara Timur	BKSDA SULTRA	SM Kateri dan CA Wae Wuul	Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Prov. NTT Bupati Malaka	S.186/KSDAE/PIKA/KSA.0/3/2019 tgl. 8 Maret 2019	No.PKS.18/K.5/TU/KSA/8/2019 dan No.HM.04.02/BPPW-NTT/509 Tgl 14 Agustus 2019	Peningkatan Kualitas Jalan Pemukiman di SM Kateri sepanjang 141 m, di CA Wae Wuul sepanjang $1,3$ Km, NTT	Transportasi Terbatas
32	Sulawesi Tenggara	BTN Kep. Togean	TN Kepulauan Togean	Bupati Tojo Una-una	S.455/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2019 Tgl 14 Juni 2019	No.PKS.02/T.23/TU/PIKA/8/2019 dan No.050/11/BP4D/2019 Tgl 15 Agustus 2019	Peningkatan Jalan Ruas Wakai-Sampobae $6,515$ m dan Wakai-Luangon/Bambu $5,722$ m di Zona Rimba, Z. Khusus TN Kep. Togean, Sulteng ($9,7$ ha)	Transportasi Terbatas
33	Lampung	UPTD TAHURA Wan Abdul Rachman	TAHURA Wan Abdul Rachman	Direktur Utama PT Indosiar Visual Mandiri	S.514/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2018 Tgl 16 Agustus 2018	No.522/1720/V.23/T.2/2018 dan No.736/Legal-IVM/VI/2018 Tgl 20 Agustus 2018	Perpanjangan Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Informasi/Komunikasi Stasiun Relay dan Penyiaran di TAHURA Wan Abdul Rachman	Komunikasi
34	Sumatera Selatan	BTN Berbak Sembilang	TN Sembilang	Direktur PT Raja Palma	S.363/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019 Tgl 17 Mei 2019	No.PKS.352/T.10/TU/KSA/VIII/2019 dan No.01/RJP-PKS/VIII/2019 Tgl 22-8-2019	Pemanfaatan Alur Sungai Bungin di dalam TN Sembilang sepanjang $\pm 9,88$ Km sebagai Jalur Transportasi PT Raja	Transportasi Terbatas
35	Bengkulu	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	Dirjen Bina Marga a.n. Menteri PUPR	S.659/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2018 Tgl 25 Okt 2018	No.PKS.44/T.7/TU/PKS.2/8/2019 dan No.03/PKS/Bb19/2019 tgl 29 Agustus 2019	Perpanjangan Kerjasama Keberadaan Jalan Nasional di TNBBS Ruas Sangi-Bengkunat $11,5$ Km, Liwa-Krui 15 Km, dan Rataagung-Way Manula (Batas Provinsi Bengkulu-Punggung Tampak) 14 Km	Transportasi Terbatas
36	Lampung	BBTN Bukit Barisan Selatan	TN Bukit Barisan Selatan	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang	S.627/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2019 Tgl 26 Agst 2019	No.PKS.50/T.7/TU/PKS.2/8/2019 dan No.KU.01.01-Bb3/2354 tgl 30 Agustus 2019	Perpanjangan Kerja Sama Relokasi Jalan dan Jembatan Air Manula di TN Bukit Barisan Selatan, Provinsi Lampung sepanjang ± 650 m dan lebar ± 15 m ($\pm 0,975$ ha)	Transportasi Terbatas



37	Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur	SM Pulau Bawean, CA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup dan TWA Kawah Ijen	GM PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur	S.699/KSDAE/PIKA/K SA.0/9/2019 Tgl 17 Sept 2019	No.PKS.1272/K.2/TU.2/KS A/10/2019 dan No.0099.ADD/MUM.00.01/040000/2019 Tgl 4 Okt 2019	Addendum PKS Pembangunan dan Pemeliharaan JTM 20 kV di SM Pulau Bawean, CA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup dan TWA Kawah Ijen, Prov. Jatim	Jaringan Listrik
38	Aceh	UPTD TAHURA Pocut Meurah Intan	TAHURA Pocut Meurah Intan	GM PT PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Utara	S.581/KSDAE/PIKA/K SA.0/7/2019 Tgl 31 Juli 2019	No.050/01/THR-X/2019 dan No.0006/MOU/HKM.00.01/410000/2019 Tgl 22 Okt 2019	Kerjasama Pembangunan Transmisi SUTET 275 kV dari Gardu Induk Sigli - Ulee Kareng di Tahura Pocut Meurah Intan Ds. Suka Mulia Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar (Panjang ±11,625 KM, Lebar ±26m, luas ±30,208 hektare 32 tower)	Jaringan Listrik
39	Riau	BBKSDA Riau	SM Balai Raja, SM Giak Siak Kecil, SM Bukit Rimbang, Bukit Baling, SM PLG Sebanga	Plh. General Manager, Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Tengah (SUMBAGTEN G)	S.845/KSDAE/PIKA/K SA.0/10/2019 Tgl 29 Okt 2019	No.PKS.1952/K.6/BTU/KU M.3/11/2019 dan No.AMD.01/0010.PJ/UIPSBT/2019 tanggal 19 Nov 2019	Jaringan SUTM 20 kV (tiang eksisting 2595 & baru 800 tiang) melintasi SM Balai Raja (38,169 ha), SM Giak Siak Kecil (0,14 ha), SM Bukit Rimbang Bukit Baling (22,866 ha) & SM PLG Sebanga (13,444 ha), Kab. Kampar, Kuantan Singingi, Bengkalis, Prov Riau	Jaringan Listrik
40	Papua	BBKSDA Papua	CA Cycloop	Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN (Persero)	No.S.777/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2018 Tgl 31 Des 2018	No.PKS.1149/K.4/TU/KSA/12/2019 dan No.0035.PJ/MUM.01.02/UIPPAPUA/APLN/2019 Tgl 19 Des 2019	Kerjasama Pembangunan Gardu induk Angkasa 60 MVA dan SUTT 150 kV Jalur GI Jayapura/Skyland - GI Angkasa, Jayapura, Papua (9 tower) di CA Pegunungan Cycloop Blok Rehabilitasia. Jalur jaringan transmisi sepanjang ±3.612,06 meter, dgn lebar jalur bentangan ±30 meter.b. Jumlah menara/tower jaringan transmisi sebanyak 9 unit (TIP 17 – TIP 25);c. Kebutuhan areal mobilisasi peralatan teknis ±1,38 hektar; Total areal pembangunan dgn lahan seluas ±10,49 ha.	Jaringan Listrik



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT KENDARA KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Jl. Padjadjaran No. 79 Bogor, Telp/Faks (0251) 8357956, 8357960
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 14, Jakarta 10270
Email : ditpika@gmail.com



Dit Pika Pika



@ditpika



pika.ksdae.menlhk.go.id



@ditpika



+6281315512524